

Keterangan foto: Akibat hilangnya habitat alami dan satwa liar, manusia hanya akan menemui kera di dalam kurungan. © Jurek Wajdowicz / Arcus Foundation



BAB 8



Kondisi Kera dalam Kurungan

Pendahuluan

Akibat pertumbuhan penduduk dan makin hilangnya habitat alami satwa liar, manusia akan makin sering bertemu kera di dalam kurungan. Konteks dalam kurungan ini akan memengaruhi bagaimana publik memandang status konservasi kera (Leighty *et al.*, 2015).

Kera di daerah sebarannya ditampung di berbagai bentuk pengurungan, di rumah pribadi, dipertontonkan sebagai atraksi wisata di kebun binatang, di taman safari dan perseorangan, serta dipelihara di fasilitas perawatan nirlaba. Fasilitas perawatan nirlaba tersebut didedikasikan untuk merawat kera yatim piatu, kera sitaan, dan kera terluka, dalam suaka, pusat penyelamatan, atau pusat rehabilitasi. Pusat penyelamatan dan pusat rehabilitasi berfokus pada

“Dengan tidak adanya konsekuensi hukum bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar, penyelamatan atau penyitaan tidak dapat menghalangi penangkapan kera liar lebih jauh.”

pemeliharaan dan perawatan jangka pendek bagi satwa terluka. Sementara itu, suaka memberikan perawatan jangka panjang atau seumur hidup (CITES, 2010a; Durham, 2015). Beberapa kebun binatang juga memelihara kera yatim piatu atau kera sitaan, meskipun perawatan semacam itu bukan fungsi utama mereka. Namun, kebun binatang tidak dibahas dalam kajian ini.

Bab ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama, menelaah sejarah dan konteks pusat penyelamatan di berbagai negara. Utamanya, berfokus pada 56 fasilitas serupa yang diidentifikasi oleh penulis. Bab ini mengkaji prospek kera dalam kurungan serta menggali peluang dan tantangan saat ini dan di masa mendatang bagi pusat penyelamatan tersebut. Kecuali disebutkan lain, informasi yang diberikan dalam kajian ini berdasarkan pada pengetahuan dan hasil pengamatan penulis, catatan dan data yang diberikan oleh petugas suaka dan pakar eksternal, data tidak terpublikasi serta detail yang tersedia dalam situs resmi mereka.¹ Temuan-temuan utama dalam kajian tentang pusat penyelamatan satwa liar ini adalah sebagai berikut:

- Kondisi pusat penyelamatan satwa liar sangat bervariasi di setiap negara. Banyak yang memiliki program yang patut dicontoh. Akan tetapi, hanya sedikit yang telah diuji dan diakreditasi secara mandiri untuk memverifikasi kinerja terkait dengan standar kesejahteraan dan perawatan.
- Habitat yang cocok untuk reintroduksi dan translokasi semakin terbatas. Itu berarti bahwa sebagian besar dari ribuan kera membutuhkan pusat penyelamatan. Sementara, ribuan lainnya yang masih membutuhkan perawatan akan menghabiskan hidup mereka di tempat tersebut. Apabila reintroduksi dan translokasi dimungkinkan, pemilihan lokasi dan rehabilitasi yang tepat serta pemilihan kandidat dan pemantauan pascapelepasan sangatlah penting. Hal tersebut untuk mencegah efek buruk pada kesejahteraan dan pelestarian kera liar dan rehabilitasi.

- Kondisi pusat penyelamatan yang penuh sesak dan kesejahteraan yang buruk dapat menurunkan kualitas hidup kera di pusat penyelamatan. Diperlukan pertimbangan yang cermat untuk menentukan bagaimana dan kapan kera baru dapat diterima tanpa mengurangi standar kesejahteraan kera yang telah ada dan penghuni baru.
- Dengan tidak adanya konsekuensi hukum bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar, penyelamatan atau penyitaan tidak dapat menghalangi penangkapan kera liar lebih jauh. Pada kenyataannya, hal tersebut dapat memicu perburuan dan perdagangan kera secara ilegal.
- Peningkatan kerja sama dan upaya kolektif antara suaka margasatwa, pemerintah, LSM konservasi, industri, dan pihak-pihak lain diperlukan untuk mengatasi kerusakan habitat, perburuan, dan konflik manusia-satwa liar yang mendorong kera ditempatkan di suaka margasatwa.
- Pusat penyelamatan satwa liar dapat meningkatkan kesejahteraan dan dampak pelestarian dengan: melaksanakan pengujian, akreditasi, dan evaluasi mandiri mengenai standar kesejahteraan dan konservasi yang baik; menerima tinjauan ilmiah eksternal tentang metodologi reintroduksi dan translokasi; berkomitmen melaksanakan kebijakan yang mendukung standar kesejahteraan, berkontribusi pada penegakan hukum dan mencegah korupsi; serta meningkatkan keterlibatan untuk mengatasi akar permasalahan yang mengakibatkan kera membutuhkan pemeliharaan di dalam kurungan.

Bagian kedua yaitu memperbarui statistik populasi kera dan membahas tataran peraturan yang berdampak pada kera yang dikurung. Temuan utama atas pembaruan statistik tersebut adalah:

- Saat Amerika Serikat mulai menyaksikan perpindahan simpanse dari laboratorium ke pusat penyelamatan satwa liar, prosesnya yang lambat menjadi

perhatian, sebagian karena simpanse berusia tua.

- Memastikan transparansi terkait jumlah, lokasi, dan kesejahteraan kera merupakan tantangan yang terus-menerus ada. Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menghapus sejumlah data dari basis data daring mereka, yang memunculkan kekhawatiran tentang masalah pertanggungjawaban.
- Perubahan peraturan dan tindakan oleh lembaga suatu negara terkadang memberikan dampak yang tidak terduga terhadap pusat penyelamatan di dalam maupun di luar kekuasaan hukum mereka. Satu kasus terjadi baru-baru ini berkaitan dengan permohonan izin ekspor simpanse dari Amerika Serikat ke Inggris. Langkah tersebut menimbulkan isu terkait dampak internasional dari Undang-Undang Spesies Gending Amerika Serikat, pengelolaan kera di Eropa, dan perdagangan internasional satwa liar ilegal— yang semuanya berpengaruh terhadap pusat penyelamatan dan misi mereka.

I. Melampaui Kapasitas: Pusat Penyelamatan dan Kondisi Kera dalam Kurungan dengan Penyusutan Habitat Alaminya

Latar Belakang

Sejarah dan Cakupan Pusat Penyelamatan Berbagai Negara

Pusat penyelamatan kera telah didirikan di beberapa negara selama beberapa dekade. Kehadiran mereka merupakan respons atas kebutuhan perawatan khusus terhadap kera sitaan dari para pemburu, perdagangan ilegal, peliharaan, dan yang ditarik dari kebun binatang yang tidak memadai. Penulis mengidentifikasi 56 suaka yang memelihara kera, berdasarkan pengetahuan personal, laporan pakar, dan foto serta deskripsi daring. Sebagian

suaka didirikan dan dikelola oleh orang yang berdedikasi atau lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan kera dan berkontribusi terhadap pelestarian kera. Delapan dari 56 pusat penyelamatan (14%) merupakan milik pemerintah.

Banyak pusat penyelamatan kera berkembang dari fokus awal pada penyelamatan kera individu menuju lingkup konservasi lokal dan proyek komunitas. Perkembangan ini memperkuat pemahaman tentang perilaku kera, dan penyediaan pengayaan perilaku, serta perawatan yang terfokus pada kualitas hidup. Sebuah survei pada 2011–2012 terhadap 22 pusat penyelamatan anggota Pan African Sanctuary Alliance (PASA)— termasuk tiga fasilitas yang tidak melakukan perawatan kera— menunjukkan luasnya proyek pusat penyelamatan tersebut selain penyelamatan dan kesejahteraan kera semata. Sebagian besar suaka margasatwa anggota PASA melaksanakan program edukasi terkait konservasi: 86% melakukan aktivitas di lokasi dan 82% menyelenggarakan edukasi pelestarian di luar lokasi. Secara keseluruhan, program-program ini diikuti oleh rata-rata 19.730 orang per pusat penyelamatan per tahun. Pesan edukasi yang disampaikan sebagian besar seputar hukum dan keanekaragaman satwa liar (Ferrie *et al.*, 2014).

Aktivitas lain yang dilaksanakan di pusat penyelamatan PASA meliputi:

- melakukan pengembangan staf, termasuk dukungan untuk menghadiri lokakarya aliansi (di 86% dari seluruh fasilitas yang disurvei) dan pertukaran dengan staf dari kebun binatang atau pusat penyelamatan lintas negara (32%);
- mendukung atau mendampingi proyek pembangunan jalan, jembatan, sumur bor (46%), serta klinik kesehatan dan fasilitas sanitasi (27%);
- mendukung sekolah atau pusat pendidikan (87%) dan pusat komunitas (27%);
- menyelenggarakan program hibah lokal dan bantuan pengembangan usaha (36%);

“Pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menghapus sejumlah data dari basis data daring mereka, yang memunculkan kekhawatiran tentang masalah pertanggungjawaban.”



- melakukan kajian viabilitas populasi dan habitat serta sensus lainnya (64%);
- melaksanakan penelitian ekologi (55%) dan perilaku sosial (46%);
- mendanai atau melakukan patroli antiperburuan (73%);
- melakukan pemantauan berkala terhadap habitat primata (46%);
- melaksanakan patroli antipembalakan (14%); dan
- melaksanakan penanaman pohon (59%) (Ferrie *et al.*, 2014).

Selain menyediakan lapangan kerja senilai lebih dari 1,3 juta dolar AS per tahun bagi 21 pusat penyelamatan satwa liar, kontribusi PASA terhadap ekonomi lokal mencapai rata-rata lebih dari 78.000 dolar AS setiap tahunnya (Ferrie *et al.*, 2014).

Kajian para penulis terhadap situs web dan tanya jawab dengan pusat penyelamatan satwa liar di Asia menunjukkan cakupan kegiatan yang sama luasnya. Di antaranya program pelestarian, termasuk pengelolaan bersama kawasan lindung, akuisisi habitat kera menjadi kawasan lindung, dan bekerja sama dengan pemilik lahan swasta untuk melindungi koridor habitat kera (Durham, 2015; Durham dan Phillipson, 2014).

Standar Pusat Penyelamatan Satwa Liar

Kondisi pusat penyelamatan satwa liar sangat bervariasi. Yang terpenting, standar kesejahteraan, perawatan kesehatan, dan pengelolaan fasilitas telah meningkat selama beberapa dekade terakhir seiring dengan perluasan kegiatan penyelamatan. Pedoman yang relevan tentang kera besar dan owa sudah tersedia (Farmer *et al.*, 2009; GFAS, 2013a, 2013b; PASA, 2016a). Melalui aliansi, jaringan, dan kelompok penasihat, kolaborasi antarpimpinan fasilitas, staf, dan pakar eksternal memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan dan penerapan standar serta kedalaman keahlian di pusat penyelamatan satwa liar. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam

Kotak 8.1 (Ferrie *et al.*, 2014; K. Farmer, komunikasi pribadi, 2016).

Global Federation of Animal Sanctuaries (GFAS), Orangutan Veterinary Advisory Group (OVAG), PASA dan Wild Animal Rescue Network (WARN) telah memberikan kontribusi terhadap pengenalan standar perawatan dan kesejahteraan satwa di penangkaran kepada suaka margasatwa. PASA dibentuk pada 2000, sebelum adanya standar yang dikeluarkan untuk perawatan kera Afrika di penangkaran. Komunitas suaka primata Afrika dan pakar eksternal bersama-sama mengembangkan standar PASA untuk kera Afrika dan primata lainnya (Farmer *et al.*, 2009). PASA juga mengeluarkan petunjuk untuk memandu pemeliharaan kesehatan primate dan kegiatan edukatif tentang pelestarian (Cartwright, 2010; Unwin *et al.*, 2009). Sementara itu, OVAG menerbitkan laporan lokakarya mengenai protokol perawatan kesehatan dan kesejahteraan orangutan (Commitante *et al.*, 2015).

GFAS dibentuk pada 2007 dan mengembangkan standar internasional kesejahteraan kera besar serta owa. Federasi ini menawarkan pengujian mandiri untuk memverifikasi atau mengakreditasi ketaatan fasilitas pemeliharaan kera terhadap standar ini. Akreditasi GFAS melibatkan seleksi lebih ketat dibandingkan dengan verifikasi, termasuk standar operasional dan kesejahteraan (GFAS, n.d.-c). WARN telah berkerja sama dengan GFAS guna mendorong anggotanya untuk memperoleh verifikasi atau akreditasi GFAS (GFAS, komunikasi pribadi, 2016). Banyak anggota PASA juga berupaya memperoleh akreditasi atau verifikasi GFAS.

Pada saat penulisan, hanya 13% dari suaka yang dibahas dalam bab ini yang telah diuji dan disahkan sesuai dengan standar GFAS. Satu suaka anggota WARN, International Animal Rescue (IAR) Ketapang, diakreditasi oleh GFAS, dan 6 fasilitas pemeliharaan kera anggota PASA—Chimpanzee Conservation Center, Fernan-Vaz Gorilla Project, Jeunes Animaux Confisqués au Katanga

Keterangan foto: Verifikasi atau akreditasi independen standar fasilitas penangkaran menjadi penting untuk menjamin kesejahteraan kera dalam penangkaran. © Gorilla Rehabilitation and Conservation Education (GRACE) Center/Rick Barongi

(J.A.C.K. – satwa belia sitaan di Katanga), Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro (Pusat Rehabilitasi Primata Lwiro), Sanaga-Yong Chimpanzee Rescue Center dan Sweetwaters Chimpanzee Sanctuary—diverifikasi oleh GFAS (GFAS, n.d.-b).

Antara tahun 2000 dan 2014, PASA melaksanakan pemeriksaan lapangan terhadap 13 dari 19 pusat penyelamatan anggota. Standar PASA yang telah direvisi tidak lagi mewajibkan pemeriksaan lapangan mandiri secara reguler terhadap suaka anggota, tetapi mengharuskan mereka mengisi kuesioner setiap lima tahun. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan oleh PASA jika diperlukan (PASA, 2016a). Sebaliknya, GFAS mengharuskan pemeriksaan lapangan bagi setiap verifikasi atau akreditasi pusat penyelamatan satwa liar (GFAS, n.d.-a).

Verifikasi atau akreditasi mandiri terhadap standar fasilitas pemeliharaan sangat penting guna memastikan kesejahteraan kera di penangkaran. Ini adalah satu-satunya cara agar para penyanggah dana, pemerintah, masyarakat dan mitra dapat memastikan bahwa suaka margasatwa memenuhi standar kesejahteraan internasional. Sementara, pemeriksaan cukup berfokus pada hal penting seputar kesejahteraan dan perawatan yang berkualitas, meningkatkan perhatian dan standar yang jelas kepada kegiatan lingkungan, kegiatan konservasi (termasuk reintroduksi), dan berkolaborasi dalam upaya penegakan hukum dapat memperbaiki praktik verifikasi dan akreditasi. Relevansi isu ini terhadap suaka margasatwa akan dibahas sepanjang bab ini. Mengembangkan dan menggabungkan standar-standar ini dapat memperkuat kemitraan suaka margasatwa dan organisasi akreditasi dengan LSM konservasi, pemerintah, para peneliti lapangan, dan penyanggah dana.

Pendorong Diterimanya Satwa di Pusat Penyelamatan Kera

Pendorong dan alasan diperlukannya fasilitas perawatan kera dalam kurungan berbeda-beda di setiap daerah dan negara

sebaran. Di antaranya adalah degradasi dan hilangnya habitat, perburuan, serta lemahnya penegakan hukum.

Undang-undang pemerintah di seluruh negara sebaran melarang perburuan dan perdagangan kera.² Terkecuali Republik Sudan Selatan, seluruh negara sebaran kera

KOTAK 8.1

Peran Kerja Sama

Berdasarkan sejarah, biasanya tidak mudah bagi suaka margasatwa berkomunikasi rutin satu sama lain atau dengan pakar eksternal. Lokasi yang terpencil, kurangnya konektivitas internet dan telepon, serta ketiadaan dana perjalanan menjadi hambatan komunikasi. Kerja sama di antara pusat penyelamatan satwa liar dan pakar dari luar—termasuk kebun binatang terakreditasi dan program Species Survival Plan kebun binatang, peneliti lapangan, ahli kesejahteraan mandiri dan dokter satwa—telah membantu mengembangkan kapasitas staf pusat penyelamatan satwa liar dan pakar yang berminat. Kerja sama ini tetap menjadi cara yang efektif dalam mendorong komunikasi dan pembelajaran.

Hampir tiga perempat (71%) dari 56 suaka margasatwa yang dibahas dalam bab ini ambil bagian dalam kerja sama—aliansi, kelompok atau jaringan penasihat—dan beberapa di antaranya berpartisipasi di lebih dari satu kerja sama. Enam belas di antaranya merupakan anggota PASA, 9 anggota WARN, 10 berpartisipasi dalam OVAG, 5 adalah anggota Jakarta Animal Aid Network, dan 3 merupakan anggota Gabon Great Ape Alliance. Satu fasilitas kera dalam kurungan merupakan bekas kebun binatang, juga menjadi anggota Asosiasi Kebun Binatang Asia Tenggara.

OVAG, PASA, dan WARN mengajak pakar eksternal ke pusat penyelamatan satwa liar dan memfasilitasi pertukaran informasi serta kunjungan balasan di antara fasilitas kera dalam kurungan. Kerja sama ini member suaka margasatwa akses kepada pakar edukasi pelestarian, perencanaan strategis, reintroduksi, dan obat-obatan serta pemeliharaan kesehatan oleh dokter satwa. Dana yang dikumpulkan oleh aliansi, jaringan, dan kelompok penasihat digunakan untuk membiayai ruang pertemuan, akomodasi dan makanan bagi staf pusat penyelamatan satwa liar, dan biaya perjalanan untuk menghadiri pelatihan bagi pakar eksternal.

merupakan bagian dari CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES, 2016a). Semua kera tercantum dalam Lampiran I CITES, yang melarang perdagangan komersial seluruh jenis yang tercantum dalam daftar lampiran (CITES, 2017). Namun, penegakan undang-undang dan peraturan CITES ini tidak dilaksanakan dengan konsisten dan pelanggaran masih sering terjadi (Bennett, 2011; Campbell *et al.*, 2008; Cotula *et al.*, 2015; Imong *et al.*, 2016).

Penegakan hukum yang lemah mempermudah perburuan kera liar. Di Afrika, perburuan ilegal untuk memperoleh daging satwa liar (dikenal dengan sebutan “daging satwa liar/bushmeat”) merupakan ancaman serius bagi kera di Angola, Kamerun, Republik Afrika Tengah (CAR), Republik Demokrasi Kongo (DRC), Republik Guinea Khatulistiwa, Pantai Gading, Liberia, dan Republik Kongo (IUCN, 2014d; Fruth *et al.*, 2016; Maisels, Bergl dan Williamson, 2016a; Plumptre *et al.*, 2010, 2015; Refisch dan Koné, 2005). Di beberapa negara sebaran di Asia, termasuk Bangladesh, India, Indonesia, Laos dan Vietnam, orangutan dan owa diburu untuk diambil dagingnya. Selain itu, permintaan terhadap bagian tubuh kera untuk pengobatan tradisional mendorong terjadinya perburuan simpanse (*Pan troglodytes*) dan owa di beberapa negara sebaran (Campbell *et al.*, 2008; Davis *et al.*, 2013; Geissmann *et al.*, 2013; Lao MAF, 2011; Molur *et al.*, 2005; Moutinho *et al.*, 2015; Rawson *et al.*, 2011). Bayi kera yang ditangkap oleh pemburu sering dijual sebagai peliharaan. Para pemburu juga menargetkan beberapa jenis owa untuk dijual ke kebun binatang dan taman safari sebagai peliharaan (Campbell *et al.*, 2008; Geissmann *et al.*, 2008; Molur *et al.*, 2005; Nijman dan Geissmann, 2008; Rawson *et al.*, 2011). Apabila disita atau ditinggalkan, kera hasil perburuan ilegal ini sering dikirim ke pusat penyelamatan.

Pembunuhan atau penangkapan kera juga umum terjadi dalam konflik manusia-satwa liar (Davis *et al.*, 2013; Rawson *et*

al., 2011; Williamson *et al.*, 2014). Pihak suaka sering dipanggil untuk membawa kera liar yang terancam oleh konflik ini dan memindahkannya ke habitat alami lain atau menempatkannya di pusat penyelamatan. Jika kera tersebut tidak dipindahkan, mereka akan terbunuh atau tertangkap dan bayinya akan dijual atau dipelihara (Ancrenaz *et al.*, 2015a; Durham, 2015).

Baik perburuan maupun konflik manusia-satwa liar terkait erat dengan kerusakan habitat dan fragmentasi, yang merupakan konsekuensi langsung dari aktivitas manusia seperti penebangan dan pembukaan hutan untuk perluasan pertanian industrial, pertanian subsiten dan skala kecil, penggembalaan ternak, industri ekstraktif, dan infrastruktur (lihat Bab 1–6).³ Seiring dengan menyusutnya habitat, kera-kera ini terpapar pada meningkatnya risiko diburu, ditangkap, atau dibunuh. Contoh kerusakan habitat sangat banyak. Di Indonesia dan Malaysia, konversi hutan menghancurkan dan memecah habitat kera, yang mengisolasi kera dalam petak-petak kecil hutan. Kera dewasa dapat dengan mudah dibunuh dan anaknya ditangkap (Ancrenaz *et al.*, 2015a; Campbell *et al.*, 2008; Singleton *et al.*, 2016). Di sebagian wilayah Indonesia, pembakaran hutan yang dilakukan guna membuka lahan untuk perkebunan memperburuk kerusakan habitat (Tabuchi, 2016). Di Republik Demokratik Kongo (RDK), simpanse, gorila grauer (*Gorilla beringei graueri*), dan gorila gunung (*Gorilla b. beringei*) terancam oleh pertambangan dan perdagangan batubara lokal (Plumptre *et al.*, 2015; UNEP/CMS, 2009). Infrastruktur jalan memberikan akses kepada para pemburu dan menjadi sarana untuk membawa daging satwa liar dan satwa ke pasar (Poulsen *et al.*, 2009). Kehadiran jalan lebih mengancam owa dibandingkan dengan kera lainnya karena spesies ini jarang berkelieran di tanah dan akan sangat kesulitan menghadapi hambatan ini (Chan *et al.*, 2005).

Keterangan foto: Karena penyusutan habitatnya, kera terpapar pada meningkatnya risiko diburu, ditangkap, atau dibunuh. © Jabruson 2017 (www.jabruson.photoshelter.com)

Kerusuhan sipil menimbulkan ancaman bagi kera, khususnya simpanse, gorila grauer, dan gorila gunung. Mereka menjadi korban perburuan dan kerusakan habitat yang terus-menerus oleh pengungsi, milisi bersenjata, dan militer (Plumptre *et al.*, 2015; UNEP/CMS, 2009). Beberapa kera peliharaan disita dari pasukan militer di RDK dalam beberapa tahun terakhir (Engel dan Petropoulos, 2016).

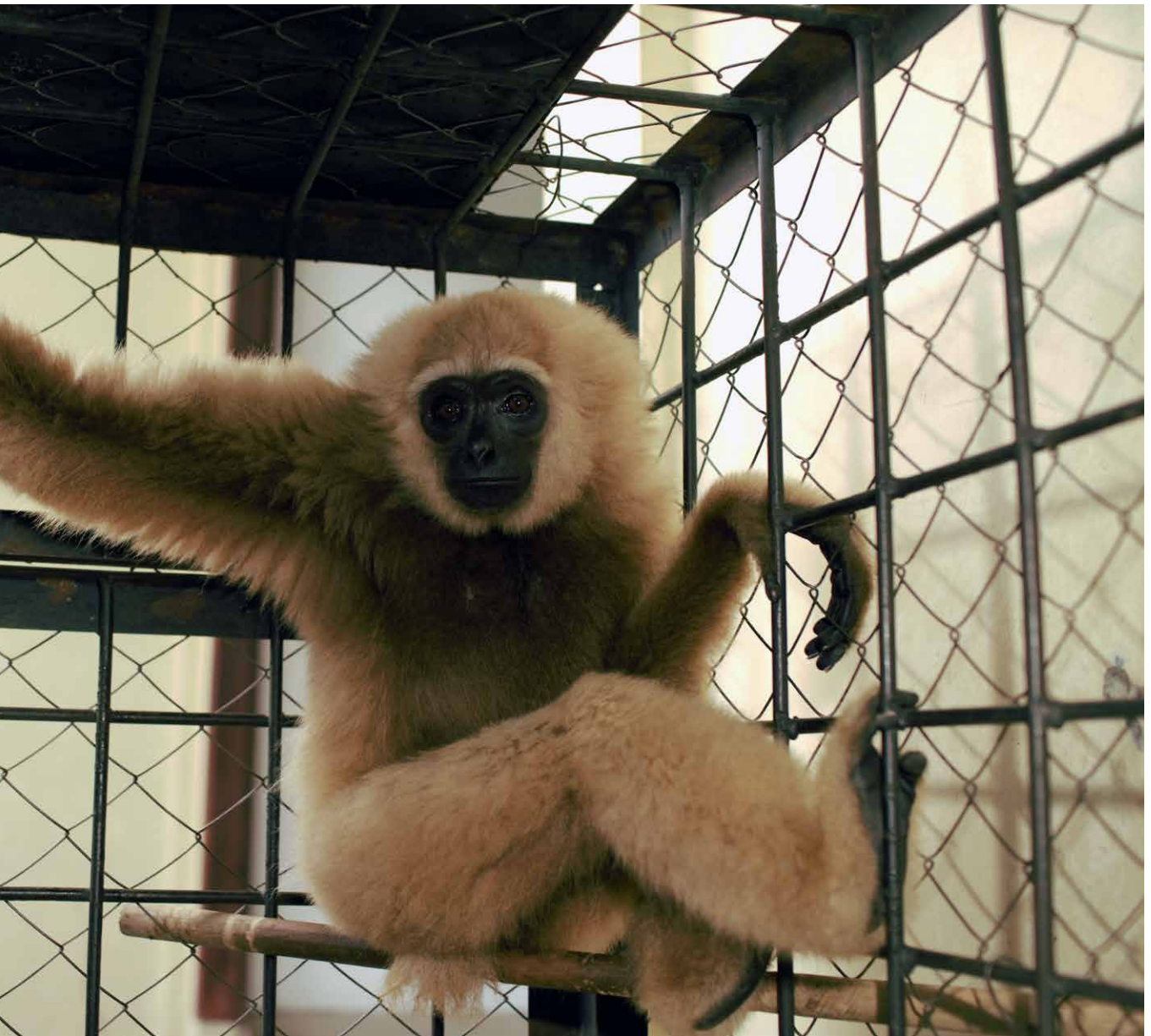
Dengan semakin seringnya kera tertangkap dan terusir dari habitat alaminya, kebutuhan ruang di penangkaran kera juga meningkat (Durham, 2015; Durham dan Phillipson, 2014). Di antara yang paling rentan adalah orangutan Kalimantan (*Pongo abelii*). Proyek-proyek infrastruktur diperkirakan akan mengganggu sebagian besar habitat mereka pada 2030 (Gaveau *et al.*, 2013). Situasi ini diperburuk oleh perubahan iklim, yang diduga akan menjadikan habitat mereka saat ini tidak lagi sesuai bagi mereka (Grueter *et al.*, 2013; Struebig *et al.*, 2015). Pembakaran hutan besar-besaran untuk membuka lahan pertanian di negara daerah sebaran orangutan sangat berperan dalam memperburuk pemanasan global dan meningkatkan risiko kebakaran hutan yang lebih luas dan lebih sering. Akibatnya, semakin banyak habitat orangutan yang berisiko mengalami kerusakan dan semakin banyak orangutan yang sakit dan membutuhkan perawatan di pusat penyelamatan satwa liar (Ancrenaz *et al.*, 2016; Tabuchi, 2016). Pada saat bersamaan, perubahan iklim dapat memengaruhi ketersediaan makanan bagi kera lain, seperti gorilla gunung (Grueter *et al.*, 2013; Struebig *et al.*, 2015).

Pertumbuhan populasi manusia di negara daerah sebaran kera juga berpotensi meningkatkan kebutuhan kapasitas suaka kera. Jumlah penduduk Angola, Burundi, RDK, Tanzania, dan Uganda diperkirakan meningkat lima kali lipat pada 2100. Sembilan negara diperkirakan mencapai 50% pertumbuhan penduduk global antara 2015 dan 2050, lima di antaranya adalah negara sebaran kera:



RDK, India, Indonesia, Tanzania, dan Uganda (UN, 2015). Karena populasi kera di lima negara ini berada di luar kawasan lindung dan pertumbuhan penduduk memperparah perburuan dan perdagangan ilegal, kera akan semakin terancam (IUCN, 2014d; Indonesia MoF, 2009; Molur *et al.*, 2005; Plumptre *et al.*, 2010).

Sejalan dengan sangat dibutuhkannya peningkatan penegakan undang-undang



perlindungan kera, peningkatan daya dukung suaka juga sangat diperlukan. Di beberapa negara daerah sebaran kera di Afrika, penegakan hukum yang lebih baik telah meningkatkan penyitaan dan penyelamatan kera. Kecenderungan ini akan tetap ada, kecuali penegakan hukum tersebut dapat mencegah para pemburu melakukan aktivitas ilegal lebih lanjut (K. Farmer dan D. Cox, komunikasi pribadi,

2012). Sementara itu, liputan media internasional tentang CITES dan undang-undang margasatwa telah meningkatkan tekanan terhadap negara-negara daerah sebaran kera untuk melarang perburuan spesies yang tercantum dalam daftar CITES, termasuk kera (lihat Kotak 8.2). Idealnya, pengawasan semacam itu dapat meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan yang lebih baik terhadap populasi kera liar.

KOTAK 8.2

Perdagangan Ilegal Kera

Fakta bahwa Chimpanzee Conservation Center dan Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro baru-baru ini menyita tiga simpanse dari upaya perdagangan internasional menunjukkan bahwa perdagangan kera di Afrika masih berlangsung walaupun jumlahnya relatif sedikit. Penelitian terbaru menunjukkan, permintaan akan kera yang ditangkap secara liar di semenanjung Malaysia dan Thailand. Di dua negara itu kera dibeli oleh kebun binatang dan digunakan untuk atraksi satwa seperti di taman safari, properti foto bagi turis, dan alat peraga wisata (Beastall dan Bouhuys, 2016; lihat Tabel 8.1). Dari hasil wawancara dengan staf fasilitas perawatan terungkap bahwa sebagian besar kera yang diketahui asalnya ini ditangkap dari alam bebas. Para peneliti menemukan bahwa fasilitas di Thailand memiliki kera bukan asli Thailand dalam jumlah yang melebihi jumlah kera yang diimpor secara legal, termasuk gorila dan owa yang tidak memiliki catatan impor legal. Buku asal-usul kelahiran satwa di kebun binatang di semenanjung Malaysia dan Thailand mencatat puluhan orangutan tangkapan liar atau tidak diketahui asal-usulnya. Walaupun, beberapa kera yang ditangkap di alam tersebut merupakan hasil dari penegakan hukum (Beastall dan Bouhuys, 2016). Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan ilegal kera di Asia masih memerlukan perhatian dan perlu diatasi melalui undang-undang, peningkatan penegakan hukum, dan kampanye kesadaran masyarakat.

Meskipun larangan perburuan dan perdagangan kera bersifat universal di berbagai negara daerah sebaran kera, perlindungan hukum untuk kera sangat bervariasi. Dalam pelaksanaannya, CITES bergantung pada undang-undang nasional. CITES mengajukan empat persyaratan untuk undang-undang nasional setiap negara partisipannya:

1. penunjukan setidaknya satu otoritas pengelola dan satu otoritas ilmiah;
2. larangan perdagangan spesies yang melanggar konvensi;
3. kesanggupan menghukum perdagangan semacam itu; dan
4. menyita spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara ilegal (CITES, 2010b).

Hanya sepuluh dari 26 negara sebaran kera yang memiliki undang-undang yang memenuhi keempat persyaratan di atas: Kamboja, Kamerun, RDK, Republik Guinea Khatulistiwa, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Senegal, Thailand (lihat di bawah) dan Vietnam. Keenambelas negara lainnya tidak memenuhi keempat persyaratan tersebut. Delapan negara memiliki undang-undang yang memenuhi satu hingga tiga dari persyaratan tersebut: Bangladesh, Burundi, Gabon, Republik Guinea, India, Mali, Republik Kongo, dan Tanzania. Delapan negara—Angola, Guinea-Bissau, Pantai Gading, Laos, Liberia, Myanmar, Sierra Leone, dan Uganda—tidak memiliki undang-undang yang memenuhi satu pun persyaratan tersebut. Undang-undang yang diperlukan sedang dalam pengembangan di keenambelas negara di atas (CITES, 2016a). Begitu disahkan dan diundangkan, undang-undang ini diharapkan dapat memperbaiki kemampuan negara untuk menyita kera yang dipelihara secara ilegal dan mengadili pelakunya. Langkah-langkah ini, pada saatnya, pasti akan meningkatkan jumlah kera yang membutuhkan pemeliharaan di pusat penyelamatan—dan dengan demikian menuntut tambahan kapasitas pusat penyelamatan.

Patut diperhatikan bahwa negara dapat memenuhi persyaratan CITES terkait dengan undang-undang nasional. Akan tetapi, hal itu masih belum cukup untuk melindungi kera, seperti yang terjadi di Thailand. Sebuah analisis terbaru tentang undang-undang satwa liar di Thailand menunjukkan kelemahan yang membahayakan kera. Saat ini, undang-undang mengharuskan pemerintah membuktikan bahwa satwa liar diperoleh secara ilegal alih-alih mewajibkan orang-orang yang memiliki satwa liar membuktikan bahwa mereka memperolehnya secara legal. Selain itu, hukuman atas pemeliharaan dan perdagangan satwa liar secara ilegal tidak memberikan pencegahan yang cukup terhadap kejahatan satwa liar. Penulis penelitian mengusulkan rekomendasi terperinci untuk memperbaiki amendemen draf Undang-Undang Thailand, B.E. 2535 tahun 1992 tentang Pelestarian dan Perlindungan Satwa Liar, yang sedang dibahas (Moore, Prompinchompoo dan Beastall, 2016).

Di Indonesia, pemerintah sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pemerintah menyadari bahwa pelaku perburuan dan perdagangan satwa liar biasanya mendapatkan hukuman penjara yang singkat (di bawah satu tahun) dan denda kurang dari Rp 100 juta (7,500 dolar AS) (Jong, 2016).

Isu lainnya yang merongrong undang-undang perlindungan kera adalah kecurangan dalam perdagangan internasional kera di bawah CITES. Para pelaku sering kali menggunakan kode “dari pusat penangkaran” untuk kera yang sebenarnya ditangkap di alam liar (CITES, 2014). Kecurangan semacam itu terutama terkait dengan kasus perdagangan di Republik Guinea antara 1999 dan 2012. Republik Guinea tidak memiliki fasilitas penangkaran kera. Oleh karena itu, pengakuan mengenai kera penangkaran yang berasal dari negara ini pasti tidak benar dan satwa yang terlibat dapat dianggap tertangkap liar (CITES, 2012). Catatan Basis Data Perdagangan CITES menunjukkan bahwa 122 simpanse dan sepuluh gorilla diperdagangkan oleh Republik Guinea menggunakan kode penangkaran (CITES, n.d.). Pada 2016, Konferensi Partisipan CITES menanggapi dengan menyetujui sebuah mekanisme bagi CITES agar meninjau, menyelidiki, dan melarang penyalahgunaan kode penangkaran (CITES, 2016b). Upaya ini bertujuan mencegah “pencucian” satwa yang ditangkap di alam bebas.

Perdagangan kera secara ilegal yang terus berlangsung dan menimbulkan ancaman terhadap jenisnya merupakan hasil ikutan perburuan ilegal, termasuk peluang penjualan anak kera sebagai penghasilan tambahan. Dengan demikian, di antara ancaman yang mendorong penurunan populasi kera, perdagangan ilegal berada di posisi lebih rendah daripada penyebab utama seperti hilang dan terfragmentasinya habitat, perburuan ilegal, serta konflik manusia-satwa, yang semuanya mempermudah penangkapan dan perdagangan kera. Namun, perdagangan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi beberapa spesies owa. Spesies kera yang secara khusus menjadi target adalah bilou (*Hylobates klossii*), owa lar (*Hylobates lar*), owa müller (*Hylobates muelleri*), owa abu-abu borneo (*Hylobates funereus*), owa jambul pipi kuning selatan (*Nomascus gabriellae*), dan siamang (*Symphalangus syndactylus*) (Brockelman dan Geissmann, 2008; Geissmann dan Nijman, 2008a, 2008b; Geissmann *et al.*, 2008; Nijman dan Geissmann, 2008; Whittaker dan Geissmann, 2008).

TABEL 8.1**Kera di Kebun Binatang dan Atraksi Wisata di Semenanjung Malaysia dan Thailand, 2016**

Spesies Kera	Jumlah kera di kebun binatang dan atraksi wisata		
	Semenanjung Malaysia	Thailand	Total
Simpanse (subspesies tidak diketahui)	14	36	50
Gorila dataran rendah barat	–	1	1
Orangutan borneo	31	–	31
Orangutan sumatera	2	–	2
Orangutan (spesies tidak diketahui)	1	51	52
Owa ungko	5	2	7
Owa lar	37	107	144
Owa jawa	1	–	1
Owa müller (subspesies tidak diketahui)	1	–	1
Owa pileated	–	34	34
Owa marga <i>Hylobates</i> (spesies tidak diketahui)	–	2	2
Owa marga <i>Nomascus</i> (spesies tidak diketahui)	–	14	14
Siamang	7	3	10
Total	99	250	349

Catatan: Owa ungko, owa lar, dan siamang merupakan kera asli Semenanjung Malaysia dan Thailand. Owa pileated merupakan kera asli Thailand.

Sumber data: Beastall dan Bouhuys (2016)

Kera di Pusat Penyelamatan di Negara Daerah Sebarannya

Asal-usul Kera di Pusat Penyelamatan Negara Sebaran

Sebagian besar kera yang berada di pusat penyelamatan merupakan hasil perburuan ilegal daging satwa liar, kerusakan dan fragmentasi habitat, konflik manusia–satwa liar, dan ditinggalkan oleh atau diselamatkan dari orang-orang yang menjadikannya sebagai peliharaan. Kera yang berada di pusat penyelamatan sebagai hasil sitaan upaya perdagangan internasional satwa liar jumlahnya jauh lebih sedikit.

Data dari pusat rehabilitasi IAR Ketapang di Indonesia menunjukkan bahwa penyelamatan terhadap kera yang dilakukan pihaknya 43% berasal dari kepemilikan ilegal, 31% dari perkebunan kelapa sawit, dan 12% ditemukan di lahan pertanian. Sementara, yang merupakan hasil pembebasan dari

perdagangan satwa liar internasional hanya 1% (Durham, 2015). Hal serupa juga terjadi di suaka di negara anggota PASA. Sebagian besar kera menjadi penghuni pusat penyelamatan akibat tindakan manusia di perbatasan negara, yang bertentangan dengan perdagangan internasional. Di RDK, Centre de Réhabilitation des Primates de Lwiro menerima 16 simpanse pada 2015–16, semuanya berasal dari RDK. Salah satunya disita di Rwanda, setelah diangkut oleh para pemburu (I. Vélez del Burgo, komunikasi pribadi, 2016).

Angka sitaan akibat perdagangan jauh lebih tinggi di Republik Guinea, yang merupakan titik penting perdagangan internasional kera afrika (CITES, 2014). Salah satu pusat penyelamatan di Republik Guinea, Chimpanzee Conservation Center, menerima tujuh simpanse pada 2015–16 yang terdiri atas 6 simpanse asli Republik Guinea dan 2 hasil sitaan dari perdagangan internasional. Pusat penyelamatan satwa liar ini juga memelihara

satu simpanse yatim piatu dari Senegal yang tidak memiliki fasilitas pemeliharaan satwa (C. Colin, komunikasi pribadi, 2016).

Prevalensi perburuan dan perdagangan lokal sebagai penyebab diambilnya kera oleh pusat penyelamatan memperkuat data yang menunjukkan bahwa kerusakan habitat, perburuan daging satwa untuk pengobatan tradisional, serta pembunuhan terkait konflik manusia-satwa merupakan ancaman terbesar bagi spesies kera liar (Brockelman dan Geissmann, 2008; Campbell *et al.*, 2008; Davis *et al.*, 2013; Indonesia MoF, 2009; IUCN, 2014d; Plumptre *et al.*, 2015).

Status dan Prospek Kera di Pusat Penyelamatan di Negara Sebaran

Tabel 8.2 mencantumkan negara sebaran yang mempunyai pusat penyelamatan dan spesies yang dimilikinya. Kecuali Bangladesh dan Myanmar, negara-negara sebaran kera di Asia mempunyai pusat penyelamatan yang memelihara kera (Wildlife Impact, 2016). Pusat penyelamatan di Kadoorie Farm & Botanic Garden di Hong Kong saat ini diketahui tidak memiliki owa, tetapi telah dilengkapi

TABEL 8.2

Kapasitas Pusat Penyelamatan di Negara Sebaran Kera, 2016

	Negara sebaran kera yang mempunyai suaka margasatwa	Spesies yang diterima
Afrika	Kamerun	Simpanse tengah, simpanse nigeria-kamerun, gorila cross river, gorilla dataran rendah barat
	RDK	Bonobo, simpanse tengah, simpanse timur, gorila grauer
	Gabon	Simpanse tengah, gorilla dataran rendah barat
	Guinea	Simpanse barat
	Liberia (fasilitas sedang dalam pengembangan)	Simpanse barat
	Nigeria	Simpanse nigeria-kamerun
	Republik Kongo	Simpanse tengah, gorila dataran rendah barat
	Sierra Leone	Simpanse barat
	Uganda	Simpanse timur
Asia	Kamboja	Spesies owa asli
	Tiongkok (Hong Kong)	Owa lar, owa pileated
	India	Hoolock barat
	Indonesia	Orangutan borneo, orangutan sumatera, owa ungu, owa janggut putih borneo, bilou, owa jawa, owa müller, siamang
	Laos	Owa jambul pipi putih utara dan selatan, spesies owa asli lainnya
	Malaysia	Orangutan borneo
	Thailand	Owa lar, owa pileated, spesies owa asli lainnya
	Vietnam	Owa pileated, owa jambul pipi putih utara, owa jambul pipi kuning utara, owa jambul pipi kuning selatan, spesies owa asli lainnya

Sumber data: Pengaruh Satwa Liar (2015,2016); akun fasilitas daring dan tidak dipublikasikan, dikaji oleh para peneliti.

dengan fasilitas penyelamatan dan karantina owa (KFBG, n.d.).

Sembilan negara sebaran kera di Afrika—Kamerun, RDK, Gabon, Republik Guinea, Liberia, Nigeria, Republik Kongo, Sierra Leone dan Uganda—mempunyai pusat penyelamatan yang memelihara kera (Wildlife Impact, 2015, 2016). Lebih dari setengah negara sebaran kera di Afrika—Angola, Burundi, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, Ghana, Guinea-Bissau, Mali, Rwanda, Senegal, Sudan Selatan dan Tanzania—tidak memiliki pusat penyelamatan yang dilengkapi sarana untuk merawat kera (Wildlife Impact, 2015, 2016). Pantai Gading tidak memiliki pusat penyelamatan, tetapi Kebun Binatang Abidjan telah menerima simpanse dalam rangka penyelamatan. Pada 2014, kebun binatang tersebut penuh karena terlalu banyak menerima satwa termasuk simpanse peliharaan yang ditinggalkan di kebun binatang selama krisis ebola (R. Champion, komunikasi pribadi, 2014).

Jumlah kera yang membutuhkan perawatan di pusat penyelamatan jauh melebihi kapasitas pusat penyelamatan tersebut. Sebagian besar pusat penyelamatan penuh dan yang lainnya hanya memiliki ruang untuk jumlah kera yang terbatas. Lebih dari 6.000 owa dan antara 25–126 kera afrika diduga dipelihara secara ilegal di berbagai negara (Durham, 2015; Wildlife Impact, 2015). Jumlah ini tidak termasuk 66 simpanse yang ditinggalkan oleh New York Blood Center di Liberia. Sementara itu, estimasi untuk orangutan tidak tersedia (Gorman, 2015a; lihat di bawah ini).

Tujuan utama pusat rehabilitasi/ penyelamatan di banyak negara adalah memperkenalkan kembali kera ke habitat alamnya (reintroduksi). Namun, reintroduksi tidak selalu dapat dilaksanakan dengan mudah karena mungkin tidak sejalan dengan tujuan pelestarian. Sebagaimana dicermati oleh Durham (2015), banyak kera yang masuk ke suaka akan menjadi penghuni seumur hidup. Bahkan,

kera di tempat transit atau fasilitas jangka pendek lainnya menghabiskan waktu bertahun-tahun atau sepanjang hidupnya di sana. Banyak pusat penyelamatan harus mengeluarkan biaya tinggi untuk infrastruktur dan pekerja guna menerima tambahan penghuni seumur hidup. Secara keseluruhan, masalah kepadatan satwa di suaka cenderung memburuk karena jumlah kera yang membutuhkan pemeliharaan, rentang umur kera yang panjang, dan penerimaan kera baru. Bahkan sekarang, pusat penyelamatan tidak mampu mengakomodasi atau menyediakan standar kesejahteraan minimum bagi ribuan kera yang dimiliki secara ilegal maupun yang baru ditangkap.

Beberapa negara tidak memiliki pusat penyelamatan satwa menunjukkan keengganan menyita satwa hidup yang dimiliki atau diperdagangkan secara ilegal (André *et al.*, 2008; Teleki, 2001). Dalam pembicaraan pribadi dengan penulis pada November 2016, ahli zoologi, Tamar Ron dan pengelola Taman Nasional Maiombe, José Bizi menjelaskan tentang kondisi terkini penyitaan di Angola, negara sebaran gorila dan simpanse yang kekurangan pusat penyelamatan satwa liar:

- Dari lima bayi simpanse dan dua bayi gorilla yang disita oleh Taman Nasional Maiombe dalam dua tahun terakhir, hanya satu simpanse yang bertahan. Simpanse tersebut dipelihara bersama beberapa simpanse dari berbagai usia di fasilitas pribadi seseorang yang berusaha menyelamatkan bayi simpanse dan gorila selama beberapa dekade. Sayangnya, fasilitas yang disediakan sangat buruk dan tidak memadai.
- Pekerja Taman Nasional Maiombe tidak memiliki kapasitas, sarana, dan kondisi memadai untuk merawat kera yang disita dari waktu ke waktu. Tidak ada fasilitas yang memadai di Angola. Pindahan ke tempat lain pun akan memerlukan sumber daya yang juga tidak tersedia. Selain inisiatif pribadi yang disebutkan di atas, terdapat sejumlah (diperkirakan beberapa

Keterangan foto:

Translokasi kera atau pelepasliaran satwa dalam kurungan ke habitat alami dapat menimbulkan risiko kesehatan dan kesejahteraan populasi kera yang dilepasliarkan, satwa liar lain, serta ekosistem dan manusia.

© Alejo Sabugo,
IAR Indonesia

lusin) simpanse dari berbagai usia yang dimiliki secara pribadi yang tidak diketahui. Sebagian besar berada di Cabinda dan Luanda dan semuanya dalam kondisi yang tidak memadai atau sangat mengkhawatirkan. Pemerintah Angola telah menunjukkan niat kuat untuk membangun pusat penyelamatan bagi kera sebagai bagian dari upaya strategis menghadapi kejahatan terhadap satwa liar. Akan tetapi, dibutuhkan

dukungan pihak luar untuk mendanai pengembangan, biaya operasional serta pembangunan kapasitas pekerja, dan untuk menciptakan kondisi pendorong yang diperlukan untuk upaya ambisius ini.

Membangun pusat penyelamatan baru mungkin merupakan solusi nyata. Namun, pada kenyataannya hal itu sangat mahal dan sulit dilaksanakan. Dibutuhkan keahlian khusus dan komitmen selama



hidup kera yang berumur panjang dan memerlukan biaya serta pemeliharaan intensif. Hanya sedikit yang bersedia atau mampu menjawab tantangan ini, khususnya di negara dengan tingkat kebutuhan pusat penyelamatan yang tinggi dan dengan tingkat pertikaian sipil yang juga tinggi atau tantangan lainnya.

Hubungan antara kehadiran atau ketidakhadiran pusat rehabilitasi dan penyelamatan kera masih belum jelas. Hal itu terutama karena penyitaan kera terus berlangsung di negara yang telah lama memiliki pusat penyelamatan, seperti Kamerun, RDK, dan Indonesia. Banyak faktor yang memengaruhi penyitaan dan pengambilan kera oleh pusat penyelamatan, antara lain keberadaan dan efektivitas penegakan hukum, korupsi, kesadaran

publik tentang undang-undang dan konsekuensinya, kemiskinan dan ketersediaan pangan, akses terhadap pekerjaan dan mata pencaharian, aksesibilitas dan kemudahan dalam menangkap kera liar, permintaan dan akses pasar terhadap daging, bagian tubuh kera dan kera hidup itu sendiri.

Tentu saja, kehadiran pusat penyelamatan di berbagai negara membuat penyitaan menjadi lebih praktis, di antaranya karena pusat penyelamatan berperan penting dalam memfasilitasi penegakan hukum (Farmer, 2002; Teleki, 2001). Suaka margasatwa, khususnya yang telah terakreditasi memiliki standar pemeliharaan tinggi, juga mampu meningkatkan kesejahteraan, perawatan seumur hidup, dan berpotensi melakukan reintroduksi bagi kera yang diselamatkan (Trayford dan Farmer, 2013). Kajian menyeluruh terkait kebutuhan dan kelayakan, bersama dengan kerja sama di antara organisasi, individu dan pemerintah, mungkin menjadi jalan yang lebih berkelanjutan menuju pengembangan suaka dibandingkan pendekatan *ad hoc* yang sering digunakan hingga saat ini. Mengintegrasikan suaka ke dalam upaya lebih luas untuk mengatasi kerusakan habitat, pembunuhan dan penangkapan kera, serta faktor lainnya yang menyebabkan kera memerlukan pemeliharaan akan meningkatkan efektivitas suaka margasatwa.

Reintroduksi dan Translokasi Habitat yang Sesuai di Negara Sebaran

Habitat layak menghilang dengan cepat di negara-negara sebaran kera (Funwi-Gaba *et al.*, 2014; Williamson *et al.*, 2014). Meskipun populasi kera liar berkurang, ukuran dan daya dukung habitat layak yang ada saat ini membuat tidak mungkin melepaskan seluruh kera dalam kurungan di negara daerah sebarannya. Di beberapa wilayah mungkin saja tidak ada habitat layak yang belum ditempati oleh populasi



“Ketika reintroduksi dan translokasi menjadi pilihan yang layak, pemantauan perkembangan dan dampaknya juga penting guna menentukan apakah suatu proyek konservasi dapat dikatakan berhasil.”

konspesifik (spesies yang berkerabat dekat) atau yang tidak memerlukan restorasi hutan terlebih dahulu, penetapan kawasan lindung, penegakan hukum anti-perburuan yang berkelanjutan atau upaya pelestarian jangka panjang lainnya.

Dengan laju konversi habitat orangutan yang pesat, para ahli telah lama menyimpulkan bahwa habitat layak yang masih mendukung orangutan telah dihuni dan tidak memiliki daya dukung yang memadai (A. Russon, komunikasi pribadi, 2016). Situasi yang sama juga terjadi terhadap owa di Kalimantan, Indonesia, sebagaimana dibahas dalam *Negara Kera* (Durham, 2015) sebelumnya. Gorila cross river (*Gorilla gorilla diehli*) terbatas karena peningkatan gangguan manusia dan penggunaan habitat dalam wilayah jelajahnya (Imong *et al.*, 2014a). Dengan keadaan seperti ini, bahkan restorasi habitat tidak memungkinkan reintroduksi gorila karena populasi dan aktivitas manusia ini akan menimbulkan risiko bagi manusia sendiri serta kera yang dilepasliarkan.

Manfaat dan Risiko Reintroduksi dan Translokasi

Pelepasliaran satwa dari kurungan ke habitat alaminya dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan dan kesejahteraan populasi kera liar yang dilepaskan, satwa liar lainnya, ekosistem, dan populasi manusia (IUCN/SSC, 2013). Namun, bagaimanapun, reintroduksi dan translokasi adalah satu-satunya cara untuk membangun kembali spesies di habitat dari mana mereka tercerabut.

Bila dilakukan dengan pencegahan yang tepat dalam keadaan yang sesuai, reintroduksi dan translokasi dapat menjadi cara penting. Cara ini dapat menambah keragaman genetik, meningkatkan jumlah populasi, dan memberikan fokus pada perlindungan spesies dan habitat (IUCN/SSC, 2013). Nilai pelestarian umum lainnya diketahui dari proyek pelepasliaran adalah

peningkatan kehadiran, baik otoritas penegakan hukum (penjaga hutan) maupun pemantauan satwa liar (termasuk staf proyek translokasi), yang akan mencegah perburuan dan aktivitas ilegal lainnya di lokasi pelepasliaran (Humble *et al.* 2011). Satwa yang dilepasliarkan juga dapat berperan sebagai pembawa perubahan bagi pelestarian ekosistem (Humble *et al.*, 2011; King, Chamberlan, dan Courage, 2012).

Namun, reintroduksi dan translokasi dapat menimbulkan sejumlah risiko. Salah satunya penyebaran penyakit kepada konspesifik, satwa lainnya, dan manusia. Itu berpotensi merusak dampak positif pelestarian (Beck *et al.*, 2007; Campbell, Cheyne, dan Rawson, 2015; IUCN/SSC, 2013; Jakob-Hoff *et al.*, 2014; Schaumberg *et al.*, 2012; Unwin *et al.*, 2012). Selanjutnya, populasi satwa liar biasanya memenuhi habitat layak dengan daya dukungnya, kecuali keadaan mencegahnya (Moehrenschrager *et al.*, 2013). Akibatnya, kera rehabilitasi sering dilepasliarkan ke wilayah yang telah dihuni oleh kera sejenis dan kondisinya seringkali telah membatasi ukuran populasi satwa liar—karena perburuan atau kerusakan hutan.

Penelitian tentang simpanse dan bonobo (*Pan paniscus*) liar menunjukkan bahwa individu yang dilepasliarkan ke dalam populasi liar sejenis mengurangi keberhasilan betina bereproduksi (Wrangham, 2013). Penelitian lain menunjukkan bahwa simpanse jantan tidak dapat dilepaskan ke wilayah jelajah simpanse liar. Mereka bisa diserang atau terbunuh oleh individu liar sejenis. Data dari pelepasliaran simpanse di Republik Kongo, misalnya, menunjukkan bahwa banyak jantan yang dilepasliarkan terbunuh oleh jantan liar sejenis (Goossens *et al.*, 2005). Bagi orangutan betina dari rehabilitasi yang dipindahkan ke habitat orangutan liar, dalam membangun wilayah jelajah sangatlah sulit. Mereka diasingkan oleh betina penghuni asli yang tidak mengenali mereka sebagai bagian dari jaringan

sosialnya (M. Ancrenaz, komunikasi pribadi, 2016). Tekanan sosial yang dialami oleh satwa translokasi dari individu penghuni asli memang besar. Hal itu menciptakan situasi yang penuh tekanan yang dapat bertahan lama dan menjelaskan kenapa translokasi sering gagal (M. Ancrenaz, komunikasi pribadi, 2016). Menempatkan individual ke dalam populasi sejenis yang layak tampaknya bukan strategi yang menjamin konservasi atau kesejahteraan karena dapat mengurangi ruang dan sumber daya bagi kera liar, dan mengorbankan kesejahteraan kera yang dilepasliarkan.

Banyak faktor yang menentukan kelayakan kandidat reintroduksi dan translokasi, termasuk rasio jenis kelamin dan kelompok sosial di antara populasi liar sejenis, perilaku kesehatan dan sosialisasi, usia, perangai, masalah kognisi dan masalah belajar, ikatan dengan manusia dan perilaku yang dipelajari dari manusia (Bashaw, Gullot, dan Gill, 2010; Russon, 2009). Tidak semua individu yang bertahan dengan dengan baik di pusat rehabilitasi merupakan kandidat pelepasliaran yang baik. Saat kera melewati masa kanak-kanak, perilaku yang dipelajari dari manusia dan ikatan dengan manusia menimbulkan risiko dan masalah keamanan yang serius untuk kesejahteraan individu dan pelepasliaran yang sukses (Campbell *et al.*, 2015; Riedler, Millesi, dan Pratje, 2010; Russon, Smith, dan Adams, 2016). Memang, kera yang terlalu habituasi cenderung mendekati, mencelakakan, atau bahkan menyerang manusia sehingga meningkatkan risiko terbunuh atau tertangkap (Macfie dan Williamson, 2010; Russon, 2009).

Sebagai bagian dari analisis kelayakan yang disyaratkan oleh IUCN, reintroduksi dan translokasi harus dibandingkan dengan bentuk konservasi lainnya untuk menentukan cara paling efektif melindungi spesies dan habitatnya dalam keadaan tertentu (Beck *et al.*, 2007; Campbell *et al.*, 2015; IUCN/SSC, 2013; Wilson *et al.*, 2014).

Wilson *et al.* (2014) mendapati bahwa reintroduksi dan translokasi jauh lebih mahal dan membutuhkan lebih banyak upaya daripada jenis konservasi habitat lainnya.

Ketika reintroduksi dan translokasi menjadi pilihan yang layak, pemantauan perkembangan dan dampaknya juga penting. Hal itu guna menentukan apakah suatu proyek konservasi dapat dikatakan berhasil. Apakah satwa bertahan dan beradaptasi dalam kondisi musiman yang berbeda dan apakah keberhasilan perkembangbiakan mengarah pada keberlangsungan populasi (Guy, Curnoe, dan Banks, 2014; Osterberg *et al.*, 2014). Pemantauan jangka panjang juga memungkinkan identifikasi satwa yang memerlukan dukungan tambahan melalui pemberian perbekalan atau bahkan pengembalian ke fasilitas rehabilitasi (Farmer, Jamart, dan Goossens, 2010; Humle dan Farmer, 2015). Walaupun beberapa reintroduksi dan translokasi dikaji dengan hati-hati, dipantau dan didokumentasikan, banyak juga yang tidak melakukan langkah-langkah tersebut, dan secara keseluruhan kurang ada transparansi terkait masalah tersebut dan hasilnya (Guy *et al.*, 2014). Proyek yang tidak dipantau dapat mengesampingkan kematian kera dan membahayakan konspesifik liar, kera yang dilepaskan, dan manusia. Sebaliknya, bahkan di antara proyek yang dipantau dengan baik, ada yang secara sengaja tidak melaporkan hasil yang buruk karena takut kehilangan pendanaan atau kepercayaan publik.

Para penyandang dana dan pemerintah dapat mendorong evaluasi ilmiah dan ketat dalam reintroduksi dan translokasi kera dengan mengajukan atau mendanai kajian ilmiah metodologi secara eksternal. Pemerintah juga dapat mendorong upaya reintroduksi dan translokasi yang efektif dengan memberikan dukungan administratif, membangun penegakan hukum dan kapasitas pemantauan, serta memungkinkan perlindungan habitat.

Pengaruh Fasilitas Pusat Rehabilitasi: Manfaat dan Risiko Konservasi serta Kesejahteraan Kera

Manfaat bagi Konservasi dan Kesejahteraan Kera

Meningkatnya penerimaan terhadap verifikasi dan akreditasi GFAS dan minat para penyandang dana pada dampak yang ditunjukkan, ditambah kemauan sungguh-sungguh sebagian besar suaka untuk memperbaiki kesejahteraan satwa dan mengatasi masalah konservasi yang berdampak pada kera, memberikan lingkungan yang matang bagi perubahan positif. Beberapa pusat rehabilitasi mengikuti standar kesejahteraan, tata kelola yang baik, dan penyusunan program pelestarian yang melengkapi operasional pusat rehabilitasi. Beberapa suaka yang sebelumnya dikelola oleh warga asing telah diserahkan kepada pengurus lokal. Sementara, pusat rehabilitasi lainnya mencoba mencari dan melatih warga setempat sebagai pengelola. Banyak pusat rehabilitasi yang melakukan usaha luar biasa untuk menyelamatkan dan memelihara kera sambil membuka peluang untuk belajar tentang rehabilitasi, perawatan, dan penyakit. Pembelajaran dan penjangkauan yang dilakukan oleh suaka merupakan peran yang penting, terutama karena suaka adalah bagian tetap dari masyarakat setempat.

Lebih jauh, sebagai perawat jenis kera langka, pusat penyelamatan satwa liar di negara sebaran dijadikan duta jenis ini. Banyak orang yang mungkin belum pernah melihat satwa ini sebelumnya. Melihat satwa ini diselamatkan dan dirawat dengan baik melalui konteks pelestarian dapat menjadi sesuatu yang menarik bagi perlindungan mereka.

Terpenting adalah sebagian besar dari 56 pusat penyelamatan yang dibahas dalam bab ini berpartisipasi dalam patroli antiperburuan atau pelacakan kera. Peneliti menemukan bahwa kepekaan, keterlibatan masyarakat, dan kehadiran peneliti serta pelacak atau

penjaga hutan dapat membantu mencegah perburuan (Steinmetz *et al.*, 2014; Sunderland-Groves *et al.*, 2011; Tagg *et al.*, 2015). Mencegah perburuan dengan menghukum para pemburu juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap perlindungan kera, terutama jika disertai pemeliharaan kera oleh pusat penyelamatan satwa liar. Apabila upaya antiperburuan—seperti pendidikan, pembersihan jerat dan jebakan, dan patroli antiperburuan serta pelacakan—dapat menurunkan penangkapan kera dan mencegah perburuan, ada harapan untuk melindungi kera dan habitat alaminya.

Enam belas pusat penyelamatan di Afrika yang dibahas dalam bab ini menyebarluaskan informasi tentang bagaimana mereka berupaya memberikan manfaat kepada masyarakat lokal. Dua di antaranya menawarkan skema kredit mikro dan sepuluh lainnya memiliki program mata pencaharian alternatif, termasuk pertukangan. Beberapa pusat penyelamatan satwa liar memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pengembangan pendidikan, pemeliharaan kesehatan dan infrastruktur juga pelatihan dalam bidang seperti pertanian dan peternakan. Pelatihan bagi staf pusat penyelamatan yang di antaranya adalah pemeliharaan satwa, pendidikan dan pengembangan masyarakat, telah meningkatkan keterampilan secara signifikan para stafnya—dan dengan demikian dapat dipekerjakan.

Tantangan Konservasi dan Kesejahteraan Kera

Standar dan Kualitas Perawatan serta Kesejahteraan

Kualitas pemeliharaan dan kesejahteraan di pusat penyelamatan beragam, mulai dari yang terakreditasi atau terverifikasi hingga yang beroperasi di bawah standar PASA atau GFAS. Bahkan, ada yang tidak dapat diterima dengan standar apa pun. Banyak fasilitas rehabilitasi memiliki standar perawatan jangka pendek yang dapat diterima, tetapi tidak sesuai untuk pemeliharaan seumur hidup bagi kera.

Masalah yang dihadapi pusat penyelamatan satwa liar yang beroperasi di bawah standar di antaranya kepadatan yang berlebihan atau ruang yang tidak mencukupi dan kurangnya pengayaan perilaku. Selain itu, kondisi sosial yang tidak sesuai, seperti kandang yang terpercil bagi jenis kera sosial dan sarana yang tidak aman dapat menyebabkan kera kabur atau bersentuhan dengan pengunjung. Beberapa pusat penyelamatan mengizinkan interaksi antara pengunjung dan kera. Ini dapat meningkatkan risiko penularan penyakit, baik bagi pengunjung maupun bagi kera serta risiko keamanan yang serius bagi manusia (Macfie dan Williamson, 2010). Pendekatan ini dapat melanggengkan konsep bahwa kera cocok menjadi satwa peliharaan.

Beberapa suaka di wilayah habitat kera telah diperiksa atau diakreditasi secara independen. Dari 56 pusat penyelamatan satwa liar yang dibahas dalam bab ini, hanya tujuh (13%) yang telah diperiksa dan terakreditasi atau terverifikasi memenuhi standar GFAS. Jumlah ini dapat mengurangi pusat penyelamatan yang ikut serta pada pemeriksaan independen, karena pemeriksaan independen tidak mengikutsertakan pusat penyelamatan yang berusaha mendapatkan verifikasi atau akreditasi GFAS.

Namun, bahkan jika pusat penyelamatan yang berusaha mendapatkan verifikasi atau akreditasi GFAS ikut diperhitungkan, jelas bahwa peningkatan pemeriksaan independen diperlukan.

Akuntabilitas pemerintah dalam menerapkan standar kesejahteraan satwa dan penangkaran juga dapat ditingkatkan. Menyebarluaskan dan menegakkan undang-undang tentang kesejahteraan yang terkait dengan standar GFAS dapat menjamin perawatan dan kesejahteraan bagi kera di semua tipe penangkaran.

Foto yang Menggambarkan Interaksi dengan Kera

Penelitian yang dilakukan oleh Leighty *et al.* (2015) dan Ross *et al.* (2008) menunjukkan bahwa foto-foto yang menggambarkan interaksi kera dan manusia menimbulkan persepsi bahwa kera merupakan satwa peliharaan dan tidak membahayakan.

Sebuah kajian tentang gambar-gambar yang dapat dilihat oleh publik pada situs-situs web, Facebook dan Twitter 22 suaka di Afrika dari 2013 hingga 2015 menunjukkan bahwa 19 suaka (86%) menampilkan foto manusia yang berinteraksi secara langsung (menyentuh) dengan kera. Enam belas

Keterangan foto:
Kebutuhan akan ruang perlindungan memberikan tekanan yang signifikan terhadap fasilitas penyelamatan – yang banyak di antaranya kekurangan dana dan staf serta beroperasi dalam keterbatasan.
© Sanaga-Yong
Chimpanzee Rescue Center



“Kera yang lahir di suka mengisi ruang yang diperuntukkan bagi korban perburuan dan kerusakan hutan.”

pusat penyelamatan satwa liar (73%) menampilkan foto serupa di Facebook. Keenambelas pusat penyelamatan ini memasang 247 foto seperti itu antara 1 Januari 2013 dan 25 November 2015. Keterangan tertulis untuk foto-foto ini, seperti penjelasan tentang perawatan satwa atau rehabilitasi, kurang dari 70% pada saat itu (Sherman, Brent, dan Farmer, 2016).

Foto yang menunjukkan manusia memeluk kera tanpa perangkat keselamatan (masker atau sarung tangan) mendapatkan komentar seperti “Ah, saya mau memeliharanya! Mereka menggemaskan!” (Sherman *et al.*, 2016). Foto bayi kera, tepatnya bayi kera baru lahir di fasilitas perawatan, digendong dan disuapi oleh manusia memperoleh komentar serupa, seperti “Saya mau!” (Sherman *et al.*, 2016).

Foto-foto ini memicu argumen bahwa pesan media dari pusat penyelamatan malah memperkuat minat manusia untuk memelihara kera. Beberapa pusat penyelamatan memiliki aturan yang melarang relawan dan pengunjung memajang foto mereka yang menunjukkan saat berinteraksi dengan kera. Pusat penyelamatan perlu lebih memperhatikan reaksi di media sosial terhadap foto-foto yang diunggah dan harus lebih berhati-hati agar tidak mengunggah foto yang menunjukkan interaksi staf dan kera dalam keadaan apa pun yang dapat menimbulkan kesan bahwa kera merupakan satwa peliharaan.

Kapasitas Pusat Penyelamatan

Kelahiran adalah masalah serius bagi pusat penyelamatan di berbagai negara habitat kera. Beberapa pusat penyelamatan secara sengaja mengembangbiakkan kera, sedangkan pusat penyelamatan lain mengalami apa yang disebut “kelahiran tidak disengaja”. Antara 2014 dan 2016, terjadi kelahiran di sepuluh pusat penyelamatan kera di Afrika. Tujuh di antaranya mengunggah mengenai kelahiran tersebut di media sosial—situs web, Facebook atau Twitter—dan ada beberapa yang memanfaatkannya untuk mengumpulkan

dana. Sebuah kajian tentang unggahan di media sosial pada rentang waktu 1 Januari 2013 hingga 25 November 2015 menunjukkan sedikitnya terjadi 19 kelahiran di tujuh pusat penyelamatan ini (Wildlife Impact, 2015). Jika tidak dikendalikan, perembangbiakan seperti ini akan memadati pusat penyelamatan atau paling tidak memerlukan biaya yang tidak sedikit guna perluasan fasilitas. Informasi yang tepat untuk mencegah kelahiran tak disengaja dan bantuan teknis kontrasepsi tersedia di mitra kebun binatang dan dokter hewan.

Tidak ada penjelasan konservasi tentang kelahiran kera di pusat penyelamatan satwa liar negara daerah sebaran, tetapi ada penyanggahan terkait hal tersebut. Rencana aksi pelestarian kera tidak merekomendasikan adanya kelahiran di pusat penyelamatan di negara daerah sebaran, kecuali dalam konteks reintroduksi owa ungko (*Hylobates agilis*) dan jika ada skenario darurat bagi owa jambul hitam hainan (*Nomascus hainanus*).⁴

Kera yang lahir di pusat penyelamatan mengisi ruang yang diperuntukkan bagi korban perburuan dan kerusakan hutan. Contoh-contoh kapasitas pusat penyelamatan PASA bagi simpanse menunjukkan bahkan kelahiran yang kadang-kadang terjadi di pusat penyelamatan menimbulkan dampak yang besar karena menyebabkan meningkatnya populasi dan biaya (Faust *et al.*, 2011). Efek ini menjadi perhatian khusus mengingat masuknya kera sitaan yang terus berlanjut dan fasilitas yang terbatas. Populasi di pusat penyelamatan saat ini sudah jauh melebihi jumlah kera yang dapat dilepasliarkan. Tidak ada pula argumen tentang kesejahteraan karena kelahiran kera di pusat penyelamatan di negara daerah sebaran, yang banyak di antaranya berhasil mengelola populasi bukan hasil penangkaran.

Kebutuhan ruang yang signifikan memberikan tekanan pada pusat penyelamatan—yang sebagian besarnya kekurangan dana dan beroperasi dengan kondisi yang sulit—untuk membuat keputusan menyakitkan. Ini adalah kenyataan yang tidak

menguntungkan bahwa pusat penyelamatan satwa liar tidak selalu dapat menyelamatkan kera baru tanpa mengurangi kesejahteraan penghuni yang ada.

Pusat penyelamatan harus dengan jelas menetapkan kapasitas maksimumnya berdasarkan standar kesejahteraan yang baik bagi kera penghuni. Kemudian, mereka mengembangkan kebijakan penerimaan satwa yang dirancang untuk menjaga standar tersebut. Sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, pusat penyelamatan satwa liar memerlukan pemahaman yang realistis mengenai pilihan mereka untuk memperluas kapasitas, jika ada, dan informasi mengenai kapasitas pusat penyelamatan lainnya yang memiliki standar memadai. Idealnya, yang berada di wilayah habitat subspecies.

Dengan tidak adanya alternatif semacam itu, kebijakan euthanasia harus dikembangkan, selama hal itu legal di negara tersebut. Kebijakan semacam itu dapat dirancang untuk menetapkan keadaan seperti apa yang memungkinkan pusat penyelamatan membuat pilihan mengakhiri penderitaan dan menghindari kera dari kualitas hidup yang rendah. Mengakhiri hidup tidak pernah mudah dan tidak pernah tanpa perlawanan. Akan tetapi, kera yang hidup dalam kondisi buruk dan fasilitas penuh sesak akan menderita karena peningkatan agresi, stres (menyebabkan lemahnya imunitas dan meningkatnya penyakit). Makanan yang buruk dan perilaku abnormal juga mengakibatkan kerusakan fisik yang lebih besar pada anggota kelompok yang lebih rendah. Sebaliknya, untuk melakukan eutanasia terhadap kera akan ada biaya sosial dan biaya pelestarian, khususnya jika hal itu mengekalkan persepsi publik bahwa kera lebih baik mati daripada hidup tidak berharga.

Dalam kondisi sulit ini, pertimbangan penting adalah bahwa kera dan satwa liar asli lainnya merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan pusat penyelamatan. Pusat penyelamatan bersama-sama dengan kelompok pelestarian dan kelompok

kesejahteraan harus memastikan agar pemerintah sadar akan situasi penyebab kera liar membutuhkan perawatan di fasilitas penyelamatan dan rehabilitasi. Mereka juga mesti meminta negara bertanggung jawab atas hasil akhir bagi kera-kera tersebut. Pemeriksaan dan evaluasi independen berkala juga dapat membantu pusat penyelamatan menilai pilihan yang layak dan membuat keputusan berdasarkan bukti. Kajian seperti itu akan sangat berguna dalam membantu suaka memastikan bahwa fokus strategis mereka berkontribusi terhadap tujuan kesejahteraan dan konservasi yang konkret.

Kebijakan Penerimaan

Kebijakan penerimaan pusat penyelamatan satwa liar terhadap satwa berbeda-beda, terutama soal apakah mereka memerlukan penyitaan atau tindakan hukum untuk menerima satwa. Penyitaan berarti segala tindakan hukum dan tuntutan di atas kertas yang menyatakan bahwa satwa tersebut disita—tanpa konsekuensi bagi pelaku. Beberapa pusat penyelamatan hanya menerima satwa sitaan, sedangkan yang lainnya menerima semua kera, terlepas dari bagaimana mereka diperoleh. Beberapa pusat penyelamatan mengklaim bahwa mereka harus menerima semua kera yang diserahkan oleh negara. Ada juga yang berhasil merundingkan kesepakatan dengan pemerintah untuk meminta prosedur penegakan hukum sebagai prasyarat bagi setiap penerimaan baru. Atau, mereka memiliki protokol untuk mengidentifikasi solusi bagi satwa yang tidak dapat mereka terima karena tidak ada ruang.

Jika pusat penyelamatan tidak dapat mengatasi masalah penerimaan semacam itu dengan pemerintah, mereka hanya melanggengkan kegagalan penegakan hukum terkait satwa liar. Meskipun isu penerimaan dapat menyebabkan masalah sulit—yang sering dipersulit oleh korupsi, sebagaimana dibahas di bawah—sangat penting dalam menentukan tujuan pusat penyelamatan dan mengkaji dampaknya terhadap konservasi dan kesejahteraan kera.

“Untuk memberikan kekuatan kepada hukum, pemerintah harus memublikasikan konsekuensi memiliki dan menjual kera serta memastikan bahwa pelaku diganjar hukuman penuh.”

Survei terhadap masyarakat yang dilakukan di Republik Kongo dan Kalimantan, menunjukkan bahwa kesadaran publik terhadap status dilindungi kera telah meluas. Survei tersebut menemukan bahwa 90% responden di Kongo and 73% responden di Kalimantan mengetahui bahwa kera dilindungi oleh undang-undang (Cox *et al.*, 2014; Meijaard *et al.*, 2011). Di Kalimantan, pengetahuan ini dikaitkan dengan berkurangnya pembunuhan terhadap orangutan (Meijaard *et al.*, 2011).

Temuan ini memiliki dua implikasi terhadap pusat penyelamatan kera. Pertama, kesadaran publik akan status lindung kera dan konsekuensi hukum terhadap perburuan atau perdagangan kera sangat penting dalam mengatasi perburuan dan pasar lokal yang menjual daging kera dan kera sebagai peliharaan. Dengan demikian, pusat penyelamatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye pendidikan yang ditargetkan.

Kedua, pusat penyelamatan umumnya tidak menerima kera jika belum disita secara sah atau jika tidak ada kemungkinan konsekuensi hukum bagi pembeli atau pemburu, seperti penuntutan, denda atau penahanan. Jika tidak ada penyitaan atau konsekuensi hukum, pembeli cenderung akan membeli lagi kera lain. Namun, jika orang yang menjual atau membeli kera ditangkap dan diberi hukuman dan uangnya dikembalikan, hukum telah ditegakkan dan pesan pencegahan telah disampaikan kepada pemburu, pedagang, dan pembeli. Untuk memberikan kekuatan kepada hukum, pemerintah harus memublikasikan konsekuensi memiliki dan menjual kera serta memastikan bahwa pelaku diganjar hukuman penuh.

Jika kebijakan penerimaan satwa tidak terikat pada konsekuensi hukum, pusat penyelamatan kera akan merusak upaya konservasi kera dengan menyiratkan bahwa membeli, mengangkut, dan memelihara kera dapat diterima. Apalagi, jika tidak melakukan apa pun untuk mendorong penegakan undang-undang tentang satwa liar dalam

kasus yang jelas menunjukkan bahwa pejabat pemerintah mengabaikan undang-undang atau terlibat dalam perdagangan ilegal kera, pusat penyelamatan telah membiarkan pemerintah mencela hukum sehingga melanggengkan perdagangan satwa.

Mengikatkan penerimaan satwa pada konsekuensi hukum yang sesuai adalah protokol yang didorong oleh Jaringan Eco Activists for Governance and Law Enforcement (EAGLE), koalisi LSM penegakan hukum dan konservasi di Afrika, untuk diikuti oleh suaka margasatwa sejak lama. Protokol tersebut juga sejalan dengan prosedur yang digunakan oleh Humane Society of the United States (HSUS) dalam menyelamatkan satwa yang dimiliki secara ilegal. Sebelum melakukan setiap penyelamatan, HSUS bekerja sama langsung dengan penegak hukum untuk memastikan pelaku bertanggung jawab secara hukum dan untuk mencegah mereka mendapatkan satwa lainnya dan mengulangi pelanggaran (K. Nienstedt, komunikasi pribadi, 2016). Proses serupa di negara berkembang jelas lebih menantang dan masyarakat internasional dapat melakukan lebih untuk mendukung pemerintah, suaka, dan LSM dalam upaya mereka meningkatkan transparansi, mengurangi korupsi dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Apabila dilakukan bersamaan, perubahan-perubahan ini dapat mendorong suaka mengikatkan diri pada konsekuensi hukum.

Pusat penyelamatan jarang terlibat dalam aspek penuntutan terkait dengan undang-undang satwa liar. Akan tetapi, mereka dapat memainkan peran penting dalam mendorong penegakan hukum melalui kemitraan dan kegiatan penjangkauan lainnya, seperti dibahas di bawah. Beberapa pusat penyelamatan menunjukkan upaya yang baik dengan memastikan setiap satwa yang mereka terima memiliki catatan legal yang dapat ditelusuri. Catatan ini membantu penegakan hukum agar tersangka bertanggung jawab dan menciptakan pencegahan terhadap orang yang hendak melakukan kejahatan satwa liar.

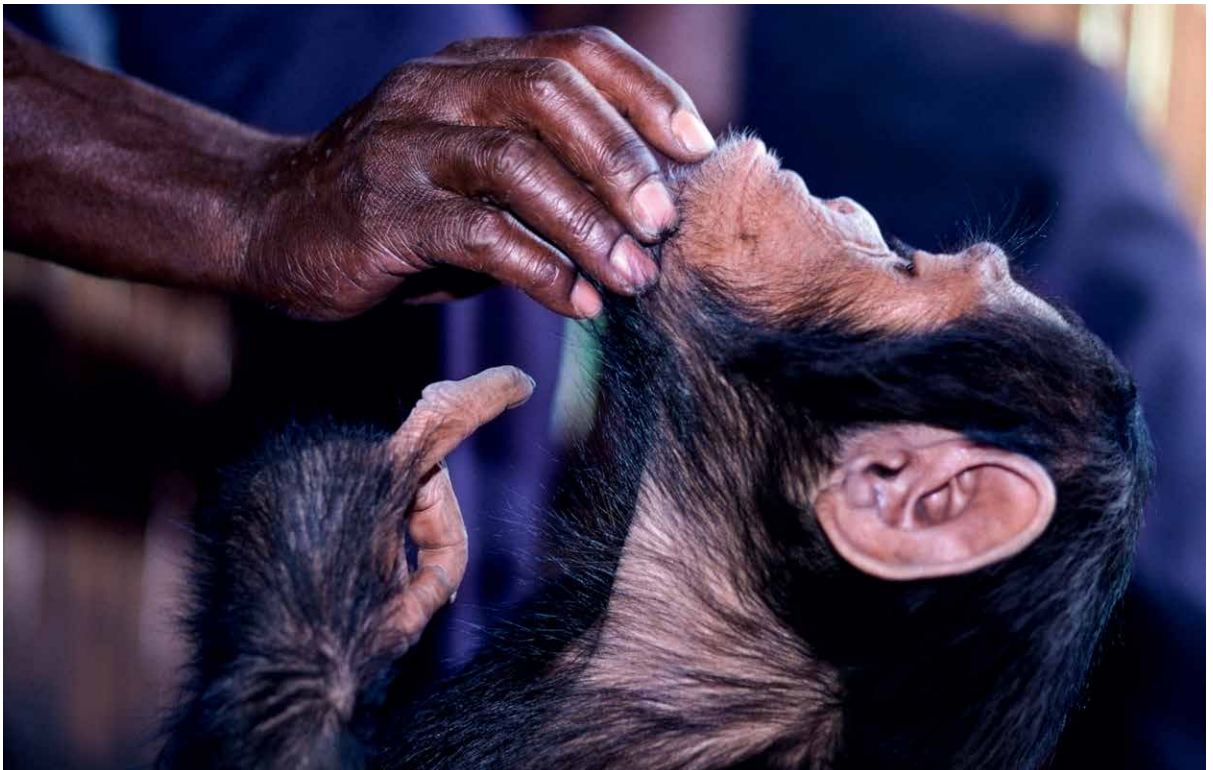
Hubungan Pemerintah dan Penegakan Hukum: Cara untuk Meningkatkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Pencegahan

Secara historis, LSM menanggung beban untuk mendukung proyek berorientasi kesejahteraan, seperti mendirikan dan memelihara pusat penyelamatan satwa untuk memungkinkan penempatan dan perawatan satwa liar peliharaan ilegal yang disita oleh pemerintah. Beberapa pusat penyelamatan dan LSM terkait telah menerima kenyataan, bahwa pemerintah tidak memberikan kontribusi finansial demi kesejahteraan satwa sitaan dan membatasi keterlibatan dalam hal memperbolehkan fasilitas semacam itu beroperasi di sekitar wilayah mereka. Namun, jika pemerintah menghargai kapasitas ini untuk merawat satwa liar yang disita secara memadai, maka pemerintah akan menerima beban keuangan lebih banyak dalam proses yang mahal ini. Untuk itu, pusat penyelamatan harus mempertimbangkan peran mereka dalam konservasi jangka panjang kera dan menyusun pembagian

tanggung jawab serta komitmen finansial di antara semua pihak, termasuk pemerintah, dalam kesepakatan tertulis.

Pusat penyelamatan satwa mungkin akan diuntungkan jika lebih asertif dalam meminta dukungan finansial dan operasional dari mitra pemerintah. Pemerintah yang memberi wewenang untuk mendirikan pusat penyelamatan ternyata lalai memikul tanggung jawab penting ini. Padahal, langkah ini sangat diperlukan untuk memastikan penempatan yang sesuai dan pemeliharaan jangka panjang yang memadai bagi satwa-satwa ini. Selain itu, pemerintah di berbagai negara sebaran kera telah gagal memberlakukan undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan ilegal yang menyokong perdagangan satwa hidup. Itu mengakibatkan para pemburu liar, pedagang satwa liar, dan orang berpengaruh yang berpartisipasi atau memfasilitasi perdagangan spesies lindung hampir kebal hukum (Lawson dan Vines, 2014; TRAFFIC, 2008; WWF dan Dalberg, 2012). Pemerintah juga gagal membangun

Keterangan foto: Suaka penyelamatan kera, pemerintah dan pemangku kepentingan lain harus melakukan tindakan ekstra untuk penyitaan dan penyelamatan kera agar lebih berkontribusi pada aksi penegakan hukum satwa liar yang efektif dan pemeliharaan populasi kera yang layak bagi kera besar di alam liar. © Jabruson 2017 (www.jabruson.photoshelter.com)



pencegahan kejahatan terhadap satwa yang sangat dibutuhkan. Pada saat yang sama, pemerintah terus mengimbuu sifat simpatik pusat penyelamatan. Dengan menerima beban finansial jangka panjang yang menyertai pemeliharaan satwa-satwa ini, pusat-pusat penyelamatan ini meminggirkan pemerintah dari tanggung jawab. Paling tidak, peran pemerintah sebagai mitra pusat-pusat penyelamatan harus memiliki kapasitas dan kemauan untuk memastikan penegakan hukum yang sesuai pada kejahatan terhadap satwa liar.

Beban finansial jangka panjang pusat penyelamatan semakin tidak dapat dipertahankan karena menjadi semakin padat. Apalagi, memperoleh biaya operasional semakin sulit seiring dengan kebutuhan akan ruang di pusat-pusat penyelamatan terus meningkat, sedangkan sumber dana semakin jarang dan kompetitif. Hanya, jika memikul lebih banyak tanggung jawab dan dipaksa/diwajibkan untuk lebih terlibat, pemerintah akan mulai mengambil peran kepemimpinan yang serius dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan spesies dilindungi. Serta dalam mengurus hambatan operasional dan finansial yang dihadapi oleh pusat-pusat penyelamatan. Skenario yang sama juga sebagian besar berlaku bagi proyek pelestarian di dalam habitatnya. Namun, pemerintah telah mulai memikul beban finansial dalam melaksanakan aktivitas pelestarian yang berbiaya tinggi, termasuk penegakan hukum. Pemerintah mungkin tidak akan berkomitmen dalam kegiatan pelestarian dan kesejahteraan sampai mereka memperoleh investasi yang cukup besar, yang harus mendukung secara terus-menerus program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah kera yang perlu dipelihara di pusat-pusat penyelamatan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi populasi kera liar.

Walaupun sulit memperoleh data tentang kasus korupsi karena sifat rahasianya, banyak bukti secara anekdot menunjukkan bahwa tingkat korupsi yang tinggi mencirikan sebagian besar insiden yang karenanya kera

dibawa ke pusat penyelamatan. Selain itu, beberapa publikasi telah menghubungkan tata kelola yang buruk dan korupsi dengan meningkatnya perdagangan ilegal satwa liar (Bennett, 2015; Smith *et al.*, 2015). Dalam beberapa kasus, suaka memprioritaskan perhatian pada kesejahteraan satwadi atas ketaatan terhadap undang-undang perlindungan kera dengan melewati proses yang ditujukan untuk proses mendaftarkan penerimaan secara formal dan berusaha membawa pelaku ke pengadilan. Satu bentuk korupsi yang khas adalah kemauan pejabat pemerintah menerima suap agar tidak menahan pelaku atau, lebih pasif, mengizinkan satwa dilepaskan atau “dibuang” ke pusat penyelamatan tanpa konsekuensi hukum (khususnya jika satwa tersebut milik pejabat, pengusaha berpengaruh atau orang penting lainnya).

Memang, korupsi sudah lama ada sebelum kera mencapai suaka margasatwa. Bayi kera mudah dikenali. Mereka tidak mungkin berpindah dari blok hutan yang jauh ke pusat kota tanpa menarik perhatian penduduk dan pegawai pemerintah, termasuk penjaga hutan, petugas kepolisian, pejabat militer, dan bea cukai. Sangat umum bagi pelaku perdagangan ilegal satwa menyuap otoritas agar tidak ditangkap dan dapat dengan bebas mengangkut kera. Dalam banyak kasus, kera berakhir di tangan pejabat tinggi, militer, pengusaha atau warga negara asing. Orang-orang atau perusahaan ini biasanya kebal hukum karena koneksi yang kuat atau karena menyuap agar bebas dari pengadilan. Begitu mulai melihat bahwa kera menjadi beban finansial jangka panjang atau menghadapi risiko fisik, mereka biasanya berusaha memindahkan satwa tersebut ke tempat perlindungan. Mengingat keprihatinan mereka terhadap kera, suaka secara historis terbuka menerima beban semacam itu, tanpa banyak pertanyaan. Jika siklus impunitas, korupsi dan kejahatan ini ditangani, pemerintah, suaka dan LSM konservasi tidak boleh menutup mata lagi.

Penuntutan, hukuman, dan pencegahan yang efektif terhadap kejahatan sangat penting untuk keberhasilan penegakan hukum. Pencegahan berada pada tempatnya jika

hukuman yang telah ditetapkan karena melakukan kejahatan dapat terlaksana untuk mencegah pelaku potensial melanggar undang-undang. Dalam sistem hukum yang korup, efek jera tidak cukup sehingga motivasi untuk melanggar hukum agar mendapatkan keuntungan tetap utuh (Bennett, 2015). Penuntutan dan hukuman bagi kejahatan terhadap satwa liar baru mulai hadir di negara sebaran kera. Bahkan, ketika pelaku kejahatan dihukum dan dipenjarakan, mereka dapat menyuap agar dibebaskan (Martini, 2013; WWF dan TRAFFIC, 2015; Wyatt dan Ngoc Cao, 2015). Dalam beberapa kasus, personel peradilan membutuhkan pelatihan dalam penuntutan kejahatan dan pengembangan dalam menjatuhkan hukuman yang akan mencegah kejahatan. Agar efektif, perangkat pencegah juga harus merefleksikan keadaan nasional. Hukuman yang dapat menghalangi penduduk yang hendak membunuh orangutan karena menyerang tanaman mereka mungkin tidak akan efektif untuk mencegah pedagang satwa liar di Afrika. Jaksa harus menetapkan alat pencegah yang dapat dipantau dan dievaluasi untuk efektivitas dalam konteks wilayah hukum mereka. Mereka yang melanggar undang-undang tentang satwa liar—baik itu perusahaan, pemburu bayaran atau pemburu tradisional, atau pedagang peliharaan—harus dituntut secara konsisten, dan kasusnya harus dipublikasikan guna memastikan pencegahan.

Dengan mengamankan penempatan yang tepat dan manusiawi untuk satwa yang disita oleh petugas penegak hukum, pusat-pusat penyelamatan dapat memainkan peranan penting dalam memberikan kontribusi pada upaya konservasi di lapangan. Sebaliknya, jika pusat penyelamatan menerima satwa dari petugas penegak hukum hanya berdasarkan dokumen hukum yang memberikan otorisasi pemindahan, tetapi tidak memiliki informasi mengenai penuntutan atau pemberian hukuman kepada mereka yang bertanggung jawab, mereka hanya melakukan sedikit untuk mencegah penyitaan di masa depan dan bahkan dapat

mendorong perdagangan tersebut.

Jika hendak berperan dalam upaya pelestarian spesies, pusat penyelamatan harus secara langsung terlibat dalam memperkuat pencegahan kejahatan satwa atau membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lain melakukannya. Ini bukan berarti bahwa suaka harus melakukan pekerjaan ini sendiri. Sebaliknya, kewajiban pusat penyelamatan adalah menerima satwa lindung dengan syarat tindak lanjut penegakan hukum dan memastikan tindak lanjut tersebut terlaksana. Untuk itu, mereka mungkin memutuskan untuk berkerja lebih dekat dengan mitra pemerintah, LSM yang mengkhususkan diri dalam upaya penegakan hukum atau LSM lokal dan internasional yang mendukung upaya konservasi satwa liar.

Banyak pusat penyelamatan melakukan program pendidikan lingkungan menyasar audiens muda agar tidak mempertimbangkan perburuan dan perdagangan satwa ilegal sebagai pekerjaan atau sumber penghasilan tambahan masa depan. Peningkatan kerja sama dengan para pemangku kepentingan yang lebih terkait erat dengan hutan tempat kera diburu—seperti LSM konservasi, pemerintah, pekerja pembangunan dan industri—dapat menjamin aktivitas edukasi ini tepat sasaran dan berdampak lebih positif. Banyak pusat penyelamatan berlokasi dekat perkotaan, yang biasanya bukan tempat pemburu berada. Namun, yang membiayai perdagangan satwa liar, yaitu masyarakat lebih sejahtera, biasanya berada di perkotaan. Orang-orang ini merupakan sasaran penting yang mungkin akan responsif terhadap informasi tentang undang-undang satwa liar dan tuntutan hukum terkait hal tersebut. Dengan demikian, mungkin saja meningkatkan kerja sama dengan pelestari dan peneliti yang familier dengan rantai perdagangan ilegal, baik di perdesaan maupun di perkotaan akan bermanfaat.

Tidak kalah penting adalah kemampuan pusat penyelamatan, LSM konservasi, dan pihak lain yang terlibat dalam pendidikan pelestarian peningkatan kesadaran untuk memantau sampai sejauh mana upaya ini

“Jika hendak berperan dalam upaya pelestarian spesies, pusat penyelamatan harus secara langsung terlibat dalam memperkuat pencegahan kejahatan satwa atau membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lain melakukannya.”

membantu mencapai tujuan pelestarian. Sampai saat ini, meskipun jutaan dolar dikucurkan untuk hal yang tampaknya penting ini, data menunjukkan bahwa nilai pendidikan lingkungan tetap saja terbatas.

Membuktikan bahwa setiap program atau kampanye memberikan pengaruh terhadap perilaku yang dapat mengurangi perburuan ilegal kera atau perusakan habitat kera dan konektivitas habitat merupakan sesuatu yang sangat menantang. Survei pra-dan pascakampanye pendidikan menunjukkan peningkatan kesadaran, tetapi tidak membuktikan perubahan perilaku (Carleton-Hug dan Hug, 2010). Tanggapan terhadap survei juga mengindikasikan bahwa masyarakat secara sadar tetap diam menghadapi aktivitas ilegal atau tak menyenangkan atau mungkin mereka telah mengetahui jawaban yang “benar” atas pertanyaan survei tersebut (Nuno dan St John, 2015; L. Pintea, komunikasi pribadi, 2015).

Untuk membuktikan bahwa perubahan perilaku telah menyebabkan penurunan permintaan kera, dibutuhkan data tentang perilaku orang yang membeli dan menjual daging satwa liar dan kera. Pusat penyelamatan perlu menunjukkan bahwa mereka telah menjangkau kelompok demografi yang sesuai—mereka yang terdiri atas orang yang paling mungkin membunuh, menjual atau membeli kera—dan bahwa audiens ini tidak hanya memperoleh pengetahuan yang relevan, tetapi juga mengubah perilaku yang menggiring pada perburuan kera. Untuk menghentikan perilaku berburu, pemerintah juga harus secara aktif mencegah perburuan ilegal dengan melaksanakan patroli antiperburuan yang efektif. Mereka harus memastikan bahwa undang-undang satwa liar ditegakkan dengan baik dan menuntut serta menjatuhkan hukuman kepada para pelaku.

Kesimpulannya, pusat penyelamatan, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya harus mengambil tindakan ekstra terkait dengan penyitaan dan penyelamatan kera agar dapat berkontribusi dalam penegakan undang-undang

satwa liar yang efektif dan pemeliharaan populasi kera besar di alam liar. Langkah-langkah tersebut adalah:

- suaka/pusat penyelamatan tidak menerima kera yang dimiliki secara ilegal kecuali ada keterangan resmi yang menyatakan bahwa lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyitaan tersebut telah melaksanakan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap tindakan ilegal yang dilakukan dan telah menangkap, dalam proses menangkap, atau akan mengadili dan menghukum para tersangka pelaku;
- pengelola suaka/pusat penyelamatan mengajukan pertemuan berkala dengan lembaga penegakan hukum untuk memastikan bahwa tindak lanjut yang memadai atas semua kasus yang sedang berlangsung dengan keputusan yang tertunda telah dilaksanakan atau sedang dalam proses;
- suaka/pusat penyelamatan bermitra dengan otoritas dan organisasi konservasi yang mengejar hasil penegakan hukum kasus satwa liar untuk memastikan bahwa ada pedoman hukum yang memadai dan hukuman dijalankan oleh pelaku;
- pemerintah menegakkan hukum secara konsisten terhadap semua pelaku kejahatan terhadap satwa liar;
- suaka/pusat penyelamatan secara berkala membagikan data penting dan informasi intelijen kepada mitra yang ditempatkan secara strategis untuk membantu mengatasi masalah di tempat asal penyitaan. Selain itu, memfasilitasi upaya intervensi terkoordinasi guna mencegah perburuan dan perdagangan satwa di masa depan; dan bahwa
- suaka/pusat penyelamatan secara reguler menyebarluaskan data kepada mitra konservasi dan advokasi strategis serta media atau kepada mitra yang memiliki spesialisasi di bidang perencanaan komunikasi publik untuk mencegah audiens terlibat dalam perdagangan ilegal kera.

“Pusat penyelamatan dapat meningkatkan pelestarian kera dengan menjadi mitra yang lebih aktif dalam upaya konservasi dan perencanaan yang lebih luas.”

Perlindungan Habitat dan Rencana Konservasi

Pusat penyelamatan dapat meningkatkan pelestarian kera dengan menjadi mitra yang lebih aktif dalam upaya konservasi dan perencanaan yang lebih luas. Saat ini, banyak suaka yang tidak bekerja sama dengan organisasi konservasi, peneliti lapangan, pengusaha atau pemerintah mengenai perencanaan pengelolaan habitat kera (Wildlife Impact, 2016). Perencanaan ini akan menetapkan pengelolaan lahan yang merupakan asal kera yang berada di fasilitas penyelamatan. Populasi signifikan beberapa jenis kera—seperti orangutan borneo, gorila dataran rendah barat (*Gorilla gorilla gorilla*), dan simpanse tengah (*Pan troglodytes troglodytes*)—sebagian besar berada di luar kawasan lindung (Ancrenaz *et al.*, 2015b; IUCN, 2014d). Pentingnya bekerja sama dengan LSM konservasi, peneliti lapangan, pengusaha, dan pemerintah adalah untuk melibatkan industri pertanian dan penebangan kayu serta pemilik lahan tradisional di sekitar habitat kera sehingga tidak berlebih-lebihan.

Lebih jauh, pusat penyelamatan dan LSM harus menekan pemerintah supaya memastikan undang-undang memberikan perlindungan yang memadai terhadap habitat kera yang kritis. Di beberapa negara sebaran kera, menghancurkan habitat kera merupakan sesuatu yang legal. Dalam beberapa kasus, undang-undang pelestarian yang melindungi kera dapat dikesampingkan atau diabaikan demi konsesi komersial (Rainer dan Lanjouw, 2015; Tata *et al.*, 2014; E. Meijaard, komunikasi pribadi, 2017). Pusat penyelamatan satwa liar yang tidak memiliki kapasitas atau waktu untuk memusatkan perhatian pada persoalan pelestarian yang lebih luas dapat bekerja sama dengan atau mendorong upaya mitra konservasi untuk menyajikan proyek yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang kera liar di habitat alami mereka.

Satu hal yang menjadi perhatian berkaitan dengan pelestarian habitat adalah

bagaimana pusat penyelamatan dan perusahaan swasta menangani translokasi dari alam liar ke alam liar kera asia. Di Kalimantan, beberapa translokasi telah menyebabkan pembukaan lahan tambahan (M. Ancrenaz, komunikasi pribadi, 2016). Perusahaan sering meminta pusat penyelamatan atau pemerintah untuk menghilangkan apa yang mereka sebut “masalah” orangutan yang tinggal di hamparan hutan-hutan kecil di mosaik bentang alam. Jika suaka setuju untuk memindahkan orangutan, pelaku industri akan cenderung membersihkan hutan-hutan kecil tersebut karena tidak lagi berisi spesies bernilai pelestarian tinggi (M. Ancrenaz, komunikasi pribadi, 2016). Dalam keadaan seperti ini, tidak diketahui apakah individu orangutan dapat beradaptasi dan bertahan setelah mengalami translokasi.

Para ilmuwan melaporkan bahwa perusahaan merasa telah melakukan hal baik dan masalahnya terselesaikan ketika mereka menghubungi pusat penyelamatan untuk menghilangkan “masalah” kera (S. Cheyne, komunikasi pribadi, 2016). Perusahaan memang melakukan langkah yang positif dengan melaporkan perihal kera ini kepada pusat penyelamatan. Akan tetapi, mereka kurang menyadari tentang biaya dan kebutuhan jangka panjang kera yang ditranslokasi. Terlebih, perusahaan jarang berkontribusi terhadap translokasi, pemantauan pascapelepasan, atau biaya pemeliharaan jangka panjang. Banyak translokasi hanya memindahkan masalah tanpa menangani terlebih dahulu alasan kenapa kera harus ditranslokasi, seperti pengelolaan lahan yang buruk oleh perusahaan atau pengelola perkebunan (S. Cheyne, komunikasi pribadi, 2016).

Mengizinkan pelaku industri untuk membersihkan hutan-hutan kecil di dalam lanskap membuat secara keseluruhan hutan semakin kurang sesuai bagi orangutan dan satwa liar lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa jika tidak ada perburuan, orangutan dapat menggunakan kelapa sawit dan hutan tebangan alam lestari. Akan tetapi, untuk memungkinkannya, orangutan butuh

“Upaya yang dilakukan oleh pusat penyelamatan, LSM, dan industri diperlukan untuk menggalakkan pengelolaan berkelanjutan lanskap-lanskap mosaik ini. Saat “kelompok” hutan kecil ini disingkirkan, satwa tidak lagi dapat menggunakan bentang alam.”

koridor dan hutan-hutan kecil (Ancrenaz *et al.*, 2015b; Wich *et al.*, 2012b). Saat “kelompok” hutan kecil ini disingkirkan, satwa tidak lagi dapat menggunakan bentang alam dan populasinya menjadi sangat terpecah dan tidak dapat bertahan dalam jangka panjang (M. Ancrenaz, komunikasi pribadi, 2016). Pusat penyelamatan, industri, dan pemerintah harus bekerja sama dalam mencari solusi yang menggabungkan perkebunan kelapa sawit dan konsesi HPH serta mengakomodasi kera.

Upaya yang dilakukan oleh pusat penyelamatan, LSM, dan industri diperlukan untuk menggalakkan pengelolaan berkelanjutan lanskap-lanskap mosaik ini. Alih-alih memindahkan satwa dengan mengorbankan habitat kera liar lokal, pusat penyelamatan harus mendorong industri, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk fokus pada menyelamatkan habitat alami—seberapa pun ukuran hutan-hutan kecil—sebagai cara untuk menyokong populasi kera.

Keberlanjutan dan Pendanaan

Program bantuan yang mendukung pusat penyelamatan di negara sebaran kera sangatlah sedikit. Banyak pusat penyelamatan yang mengalami pergulatan dengan kurangnya dana, khususnya untuk operasi dasar (administrasi dan gaji), kebutuhan pemeliharaan satwa, dan fasilitas. Para penyandang dana semakin mengharapkan penerima bantuan memberikan bukti empiris untuk menentukan apakah dan bagaimana mereka memberikan dampak terhadap kelangsungan hidup spesies ini di alam liar. Hal ini menimbulkan rintangan bagi bakal pusat penyelamatan, yang jarang mengumpulkan jenis data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tersebut (Wildlife Impact, 2015).

Persoalan lainnya adalah banyak pusat penyelamatan yang tidak memiliki perencanaan suksesi sehingga memiliki risiko atas keberlanjutannya. Peningkatan kapasitas tingkat manajemen para staf

lokal untuk mempertahankan pusat penyelamatan dalam jangka panjang sulit dilakukan dan memakan waktu sehingga sering terlewatkan. Tempat perlindungan kera dan organisasi konservasi kecil lainnya jarang melakukan perencanaan strategis secara profesional, pemantauan hasil empiris atau evaluasi mandiri walaupun proses ini sangat penting untuk mengidentifikasi upaya yang berhasil dan mengatasi kekurangan (Farmer, 2012; Ferraro dan Pattanayak, 2006; MEA, 2005).

Transparansi tata kelola dan hasil juga sesuatu yang tidak biasa. Memang, tempat perlindungan jarang mendokumentasikan atau berbagi pelajaran dari kegagalan atau fasilitas yang hampir kolaps dengan pelaku lain di sektor ini. Hal itu menghilangkan wawasan berharga dan kesempatan untuk mengetahui kesulitan yang telah dihadapi. Kolapsnya fasilitas sejawat dapat menimbulkan tekanan besar bagi tempat perlindungan regional atau nasional lainnya untuk menemukan ruang bagi satwa dari fasilitas yang kolaps tersebut. Pada gilirannya, hal tersebut akan membanjiri tempat perlindungan ini dengan satwa yatim piatu.

Tempat perlindungan yang bergelut dengan lemahnya kelestarian mereka atau berisiko gagal total tidak mungkin dapat mengatasi akar masalah ketidakstabilan mereka jika tidak mengubah struktur dan aktivitas manajemen. Tempat perlindungan dapat meningkatkan transparansi dan berbagi pengetahuan melalui aliansi fasilitas pusat penyelamatan. Mereka juga dapat memperoleh perspektif baru dari pakar dari luar, perencanaan strategis profesional, pemantauan, dan evaluasi mandiri. Proses ini dapat membantu tempat perlindungan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi potensial, memfokuskan upaya pada tujuan proyek, menginformasikan tata kelola yang baik dan keberlanjutan, memberikan bukti empiris atas pengaruh, dan memandu penerapan praktik yang baik. Perlu dicatat bahwa perencanaan, pemantauan, dan



evaluasi memerlukan komitmen yang terus-menerus, yang dapat menyulitkan tempat perlindungan dalam jangka waktu tertentu, pendanaan, dan kepakaran. Pengakuan dan dukungan penyandang dana atas hal ini sangat penting bagi mereka. Seperti berbagi pengetahuan dan bimbingan dari rekan kerja yang telah melalui proses ini.

Kesimpulan

Tempat perlindungan kera dapat ditemukan di sebagian besar negara sebaran kera di Asia dan hampir di setengah negara sebaran kera di Afrika. Kerja sama telah memungkinkan berbagi informasi dan pelatihan di antara tempat

perlindungan dan dengan pakar eksternal. Kerja sama juga berperan dalam evolusi fasilitas ini ke dalam organisasi dengan misi yang luas yang meliputi peningkatan kesejahteraan, konservasi, dan masyarakat. Saat ini suaka berada dalam tekanan besar untuk memberikan pemeliharaan kepada banyak kera yang diselamatkan dari perdagangan daging satwa liar, kerusakan habitat, konflik manusia-satwa liar dan perdagangan satwa peliharaan. Pertumbuhan populasi manusia yang sangat pesat, yang diprediksi terjadi di beberapa negara Afrika dan Indonesia, akan mempertajam ancaman terhadap kera liar dan meningkatkan penyitaan kera buruan dan yang diperdagangkan.

Keterangan foto: Upaya suaka, LSM dan industri diperlukan untuk meningkatkan tata kelola berkelanjutan mosaik bentang alam—berapapun ukuran petak yang ada. © HUTAN-Kinabatangan Orang-utan Conservation Project/Marc Ancrenaz

“Pertumbuhan populasi manusia yang sangat pesat, yang diprediksi terjadi di beberapa negara Afrika dan Indonesia, akan mempertajam ancaman terhadap kera liar dan meningkatkan penyitaan kera liar dan perdagangan kera liar.”

Selain itu, perhatian internasional pada undang-undang margasatwa memiliki efek positif dalam menggalakan penegakan hukum yang melarang penangkapan dan perdagangan satwa liar. Seiring dengan meningkatnya penyitaan terhadap kera, kepadatan yang berlebihan dan tekanan terhadap tempat perlindungan meningkat. Pusat penyelamatan, pemerintah, penyanggah dana, LSM pelestarian, dan mitra lainnya harus bekerja sama untuk mengidentifikasi cara berkelanjutan untuk memastikan standar penangkaran yang tinggi untuk satwa sitaan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kera liar dan habitatnya secara simultan.

Reintroduksi atau translokasi kera sering digaungkan sebagai solusi atas kepadatan yang berlebihan di pusat penyelamatan dan kesejahteraan kera. Kenyataannya, proses tersebut merupakan pilihan berisiko tinggi yang dapat membahayakan pelestarian kera liar dan satwa lainnya, juga kesejahteraan baik populasi kera liar maupun kera yang telah dilepaskan. Kerusakan hutan yang berlangsung terus-menerus menjadikan kedua opsi tersebut semakin sulit karena habitat yang cocok hanya tinggal sedikit dan belum menjadi rumah bagi kera liar. Studi kelayakan, perbandingan perangkat konservasi yang tersedia, dan pemahaman yang baik akan ekologi lokal, politik lokal, dan lanskap masyarakat lokal dapat membantu tempat perlindungan menentukan apakah reintroduksi atau translokasi memungkinkan. Atau, apakah perangkat konservasi lainnya akan memakan biaya yang lebih kecil dan menyelamatkan lebih banyak hidup. Organisasi akreditasi tempat perlindungan, evaluator independen, dan penyanggah dana dapat memainkan peran penting dalam menciptakan pertanggungjawaban atas kepatuhan terhadap pedoman dan praktik terbaik reintroduksi dan translokasi IUCN. Lembaga

pendanaan khususnya dapat mendorong perubahan positif dengan menyarankan atau mensyaratkan kajian ilmiah independen mengenai metodologi reintroduksi atau meminta untuk melihat umpan balik dari upaya tersebut.

Sejumlah besar kera yang saat ini berada di pusat penyelamatan atau membutuhkan pertolongan tidak dapat dilepas dan perlu perawatan seumur hidup. Bagi banyak pusat penyelamatan, mengamankan dana operasional merupakan rintangan yang besar karena merekrut staf yang memiliki keahlian dan memastikan bahwa fasilitas yang ada dapat memenuhi standar kesejahteraan yang tinggi bagi penghuni yang semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya penyitaan, masalah ini akan bertambah. Oleh karena itu, semakin penting bahwa pusat penyelamatan memastikan kegiatan penyelamatan dan pelestarian mereka dikoordinasikan dengan hati-hati, ditargetkan, dan dievaluasi. Hal ini untuk memfasilitasi penegakan hukum dan menunjukkan kemajuan dalam menangani akar permasalahan utama yang mendorong kera membutuhkan tempat perlindungan.

Pusat penyelamatan yang gagal mendorong pihak berwenang menegakkan undang-undang margasatwa mungkin akan menghambat penegakan hukum yang efektif. Ini berpotensi memperburuk perdagangan ilegal kera. Sebaliknya, kerja sama yang meningkat dengan pemerintah dalam hal penyitaan dan perencanaan pelestarian serta aktivitas pengelolaan, program pendidikan, dan kemitraan yang ditargetkan dengan LSM menawarkan beragam kesempatan pada pusat penyelamatan untuk memberi dampak positif terhadap masalah-masalah ini.

Banyak pusat penyelamatan memimpin upaya ini. Mereka mengikuti standar dan akreditasi yang transparan, termasuk kebijakan tidak ada

pengembangbiakan dan tidak ada interaksi antara pengunjung dan satwa. Ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi akar penyebab kebutuhan suaka, penerapan pedoman IUCN tentang reintroduksi dan translokasi, dan kemauan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi independen. Dengan melakukan hal tersebut, mereka menyediakan jalur untuk semua pusat penyelamatan untuk menunjukkan keberhasilan mereka, langkah penting dalam menarik pendanaan baru, dan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelestarian kera.

II. Status Kera dalam Kurungan: Pembaruan Statistik

Peraturan terus bergeser dengan sejumlah cara yang berdampak pada bagaimana kera dipelihara atau dimanfaatkan di penangkaran. Beberapa perubahan ini mengikuti undang-undang, petisi, dan mekanisme atau aktivisme peraturan lainnya (Durham, 2015). Perubahan-perubahan lainnya berasal dari penegakan hukum atau penuntutan. Di Argentina, misalnya, seorang hakim memutuskan bahwa Cecilia, seekor simpanse yang tinggal di tempat isolasi di kebun binatang, harus dipindahkan ke tempat perlindungan khusus di Brasil untuk melindungi hak-haknya (Tello, 2016). Sebaliknya, penegakan Undang-Undang Spesies Langka Amerika Serikat adalah persoalan utama dalam penuntutan terhadap satu kebun binatang yang tidak sah di Alabama yang memiliki simpanse bernama Joe (USFWS, 2015). Setelah kasus tersebut diajukan, Joe dipindahkan ke tempat perlindungan swasta Save the Chimps, di Florida, dan pihak berwenang memerintahkan kebun binatang tersebut untuk ditutup (Brulliard, 2016; Sharp, 2016).

Kera dalam Kurungan di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa

Perubahan/penyesuaian hukum dan penegakan hukum sangat penting, tetapi manfaatnya untuk kera tidak serta-merta terasa (Durham dan Phillipson, 2014, h. 300). Di Amerika, pelarangan terhadap pembiakan, uji coba biomedis yang invasif, penggunaan untuk tujuan hiburan, kepemilikan pribadi, dan perdagangan telah menurunkan penggunaan komersial simpanse. Perubahan ini disertai dengan peningkatan jumlah simpanse di tempat perlindungan. Akan tetapi, lambatnya pemindahan simpanse ke fasilitas perlindungan menjadi masalah (Fears, 2016; lihat Tabel 8.3 dan Gambar 8.1). Mengingat usia dan kesehatan banyak simpanse yang dimanfaatkan untuk tujuan komersial di laboratorium dan sektor hiburan, keterlambatan semacam itu dapat berarti bahwa beberapa simpanse akan mati sebelum sampai ke atau tidak lama setelah tiba di tempat perlindungan. Tuntutan etis dalam hal peraturan, tindakan, dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup kera adalah menghilangkan hambatan dan halangan terhadap perubahan sehingga kera memperoleh manfaatnya.

Ukuran dan operasi suaka simpanse di Amerika Serikat sangat beragam. Beberapa di antaranya memelihara sejumlah kecil simpanse bersama dengan ratusan satwa lainnya, mulai dari ayam hingga macan (Fund for Animals, n.d.); sedangkan suaka lain yang khusus untuk simpanse, memelihara antara tujuh hingga 250 ekor (lihat Tabel 8.4). Per Oktober 2016, Chimp Haven, pusat penyelamatan bagi simpanse milik negara, dan Save the Chimps menyumbang 76.4% simpanse di fasilitas terakreditasi; delapan fasilitas lainnya menampung 141 ekor simpanse (23.6%). Satu fasilitas baru bernama Project Chimps dibuka pada 2016 dan memiliki sembilan simpanse pada Oktober tahun itu (Baekler Davis, 2016). Meskipun belum terakreditasi, organisasi

“Tuntutan etis dalam hal peraturan, tindakan, dan praktik yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup kera adalah menghilangkan hambatan dan halangan terhadap perubahan sehingga kera memperoleh manfaatnya.”

TABEL 8.3**Jumlah Simpanse di Berbagai Jenis Fasilitas Penanganan di Amerika Serikat per Oktober 2016**

Jenis Penangkaran	2011 ^a	2014 ^b	2016 ^c	% perubahan 2011-16
Laboratorium biomedis	962	794	658	-32
Pusat Penyelamatan GFAS	522	525	556	7
Kebun binatang yang terakreditasi Association of Zoos and Aquariums (AZA)	261	258	259	-1
Pameran*	106	196	111	5
Dealer atau pemilik peliharaan	60	52	37	-38
Hiburan	20	18	13	-35
Total	1.931	1.843	1.634	-15

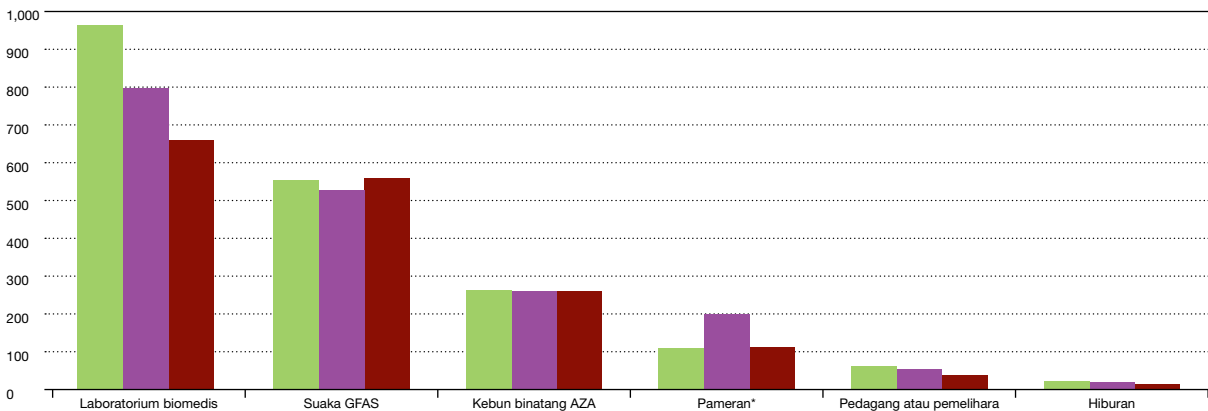
Catatan: * Pameran terdiri atas kebun binatang non-AZA dan fasilitas lainnya yang dapat terbuka atau tidak untuk umum. Kategorinya mencakup kera dari tempat perlindungan yang tidak terakreditasi GFAS atau anggota Aliansi Perlindungan Primata Amerika Utara (North American Primate Sanctuary Alliance).

Sumber data: (a) Durham dan Phillipson (2014); (b) Durham (2015); (c) ChimpCARE (n.d.)

GAMBAR 8.1**Jumlah Simpanse di Berbagai Jenis Fasilitas Penanganan di Amerika Serikat per Oktober 2016**

Kunci: ■ 2011 ■ 2014 ■ 2016

Jumlah simpanse



Catatan: * Pameran terdiri atas kebun binatang non-AZA dan fasilitas lainnya yang dapat terbuka atau tidak untuk umum. Kategorinya mencakup kera dari fasilitas yang tidak terakreditasi GFAS atau anggota Aliansi Perlindungan Primata Amerika Utara (North American Primate Sanctuary Alliance).

Sumber data: 2011: Durham dan Phillipson (2014); 2014: Durham (2015); 2016: ChimpCARE (n.d.)

tersebut menyatakan niat untuk memperluas fasilitasnya dalam beberapa tahun guna menampung lebih banyak simpanse dari laboratorium yang menghentikan operasinya (Milman, 2016).

Pada edisi awal *Negara Kera*, data yang disarikan dari laporan pemeriksaan pemerintah Amerika Serikat dianalisis untuk menentukan 1) jumlah kera di berbagai

fasilitas pemeliharaan, dan 2) risiko kesejahteraan kera yang terkait dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesejahteraan Satwa (Durham dan Phillipson, 2014). Namun, pada 2017, Departemen Pertanian Amerika Serikat menghilangkan bidang takson dari opsi pencarian di basis datanya dan tidak lagi menyediakan informasi jumlah satwa

TABEL 8.4

Jumlah Simpanse di Fasilitas Terpilih di Amerika Serikat, Oktober 2016

Nama fasilitas penanganan satwa	Jumlah kera	Total %
Center for Great Apes	28	4,7
Chimp Haven	204	34,2
Chimpanzee Sanctuary Northwest	7	1,2
Chimps Inc.	7	1,2
Cleveland Amory Black Beauty Ranch	2	0,3
Primarily Primates	38	6,4
Primate Rescue Center	9	1,5
Project Chimps	9	1,5
Save the Chimps	252	42,2
Wildlife Waystation	41	6,9
Total	597	100,0

Sumber data: ChimpCARE (n.d.)

dalam hasil pencariannya. Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk memperbaiki informasi utama tentang kera dalam kurungan di Amerika Serikat pada edisi ini. Setelah itu, lembaga tersebut juga menghapus lebih banyak data, termasuk informasi tentang pelanggaran dan upaya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Kesejahteraan Satwa, yang menimbulkan kritikan dan tindakan hukum (Brulliard, 2017c; Wadman, 2017b; lihat Kotak 8.3). Kenyataan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak lagi menyediakan informasi tertentu secara daring memunculkan kekhawatiran tentang transparansi dan pertanggungjawaban.

Kebalikan dari perubahan terbaru di Amerika Serikat, Jepang memiliki program dengan transparansi penuh. Nama, usia, dan lokasi setiap kera di negara tersebut dilaporkan secara terbuka kepada Great Ape Information Network (GAIN, n.d.). Jumlah aktual kera di Jepang ditunjukkan dalam Tabel 8.5.

KOTAK 8.3

Penolakan Akses: Hilangnya Data Kesejahteraan Satwa Amerika Serikat

Pada awal 2017, lembaga negara yang mengontrol Undang-Undang Kesejahteraan Satwa (AWA), Departemen Pertanian Amerika Serikat, tiba-tiba mencabut akses publik terhadap data daring dan dokumen resmi AWA (Wadman, 2017b). Lembaga tersebut menghentikan akses terhadap basis data dan laporan tahunan elektronik juga laporan pemeriksaan yang memberikan rincian tentang ketaatan penuh, contoh baru, dan berulangnya ketidaktaatan serta syarat yang terkait dengan kutipan lembaga tersebut, seperti waktu yang diperbolehkan melakukan koreksi (Daly dan Bale, 2017).

Sejumlah pemangku kepentingan—mulai dari organisasi hak-hak satwa serta organisasi industri kebun binatang dan laboratorium, hingga anggota kongres—menunjukkan kekhawatiran tentang dampak keseluruhan terhadap transparansi dan persepsi publik (Wadman, 2017a). Saat lembaga tersebut mengembalikan sejumlah kecil data yang dihapus, tuntutan berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi (FOIA) dan Undang-Undang Prosedur Administratif ditunda (Wadman 2017a, 2017b). Tidak ada pemecahan yang jelas dan masalah baru muncul lagi ke permukaan pada Agustus 2017 (Brulliard, 2017a).

Meskipun masyarakat masih mengajukan permintaan FOIA, tanggapan yang diberikan sangat lambat dan pemerintah dapat saja menyimpan atau menyusun ulang informasi, yang dapat menghilangkan beberapa karakter (seperti nama atau jumlah dolar) hingga beberapa halaman (Winders, 2017). Seorang jaksa yang terlibat dalam tuntutan baru-baru ini menerima hampir 1.800 halaman yang semuanya dihapus (Abel, 2017; Winders, 2017). Pegiat transparansi telah membuat upaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengunggah catatan dari arsip situs lain (Chan, 2017).

Sebagaimana dicatat dalam bab ini, jumlah, spesies, lokasi, dan nama pemegang lisensi yang memiliki kera di fasilitasnya tidak lagi terdapat dalam basis data bagi publik, seperti catatan yang digunakan dalam volume sebelumnya, *Negara Kera*, dan yang tersedia bagi publik beberapa tahun ke belakang (Brulliard, 2017a, 2017b). Pengaruh angka yang diberikan dalam volume ini paling penting bagi kera kecil karena mereka cenderung dimiliki secara pribadi sebagai peliharaan atau koleksi pribadi dan kebun binatang yang tidak terakreditasi.

Mengingat bagian penting data Amerika Serikat tidak dapat diakses, pembaruan ini hanya menyediakan jumlah simpanse dan kera lainnya yang dilaporkan dalam program pengembangan Species Survival Plans (SSPs) Asosiasi Kebun binatang dan Akuarium Amerika Serikat/Association of Zoos and Aquariums. Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 8.2, jumlah sebagian besar takson kera di dalam kurungan di Amerika Serikat tidak terlalu berubah sejak 2012, tahun yang dibahas dalam

TABEL 8.5**Jumlah Kera di Fasilitas Penanganan dan Jumlah Penampungan Kera di Jepang, Oktober 2016**

Takson	Jumlah Kera	Jumlah fasilitas
Bonobo	6	1
Simppanse	317	50
Gorila	20	7
Orangutan	49	21
Owa	181	43
Total	573	64*

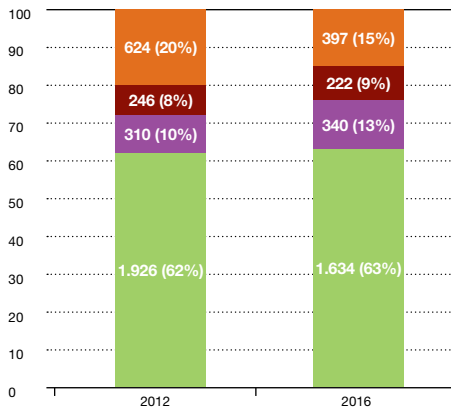
Catatan: * Beberapa fasilitas pemeliharaan menampung lebih dari satu jenis kera.

Sumber data: GAIN (n.d.)

GAMBAR 8.2**Kera di Fasilitas Penanganan di Amerika Serikat, berdasarkan Takson, 2012 dan 2016**

Kunci: ■ Simpanse ■ Gorila ■ Orangutan ■ Owa

Kera dalam kurungan (%)



Catatan: Jumlah owa termasuk semua owa dan siamang; jumlah simppanse termasuk bonobo.

Sumber data: Center for Great Apes (n.d.); ChimpCARE (n.d.); Durham (2015, Gambar 8.3); Durham dan Phillipson (2014, Tabel 10.6); Gibbon SSP, unpublished data (2016); Gorilla SSP (n.d.); Orangutan SSP (n.d.); Species360 (2016)

volume terdahulu *Negara Kera* (Durham, 2015). Data tentang owa menunjukkan perubahan yang lebih mencolok: jumlah owa sangat menurun dari 624 individu hingga ke kisaran 374–97 (Gibbon SSP, 2016; Species360, 2016). Namun,

sementara perbedaan taksonomi dan cakupan spesies dalam sumber yang dikutip menjelaskan beberapa perbedaan, penurunan jumlah tersebut menunjukkan kurangnya data satwa “kepemilikan pribadi”, kebun binatang, dan kegiatan hiburan. Informasi ini terdapat dalam basis data pemerintah pada saat kajian terdahulu, tetapi saat ini tidak ada lagi (lihat Kotak 8.3).

Sementara kualitas dan cakupan informasi yang tersedia tentang kera dan kesejahteraannya tetap menjadi perhatian bagi beberapa jenis penangkaran dan yurisdiksi tertentu, berbagai upaya dilakukan demi peningkatan standar dan praktik. Contohnya pada 2015, Komisi Eropa merilis dokumen praktik yang baik untuk ketaatan kebun binatang (Komisi Eropa, 2015). Di negara-negara Uni Eropa, sebagian besar kera dalam kurungan ditemui di kebun binatang, tunduk pada Undang-Undang Directive 1999/22/EC (Council of the European Union, 1999).

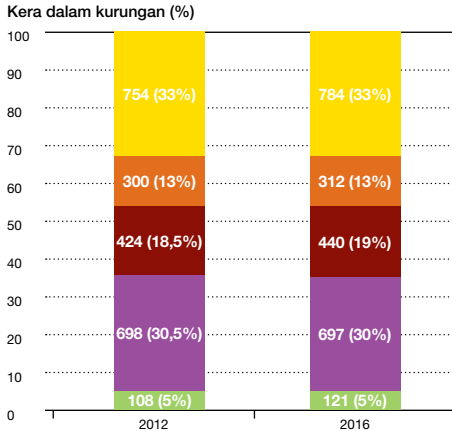
Jumlah kera di kebun binatang di Eropa sangat banyak jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat (lihat di atas), Amerika Utara (33 kera) dan Australia (158 kera) (Species360, 2016). Gambar 8.3 menunjukkan jumlah dan proporsi kera di setiap kelompok di kebun binatang di Eropa. Secara keseluruhan, data milik Eropa mengandung informasi tentang 2.354 kera di 215 lembaga anggota, yang menampung antara 1 dan 65 setiap lokasi. Owa adalah takson yang paling umum dalam sampel, diikuti oleh simppanse, gorila, orangutan dan bonobo. Jumlah kera soliter dalam sampel ini sangat sedikit: 18 kera, atau kurang dari 1%. Mengingat kebutuhan dan kapabilitas sosial mereka, semua kera di dalam kurungan merupakan bagian dari kelompok individu yang saling sesuai.

Di Eropa, sejumlah kecil kera dan primata yang jumlahnya perlahan menurun masih digunakan di sirkus atau pergelaran lain yang tidak sesuai.

GAMBAR 8.3

Kera di Kebun Binatang Terpilih di Eropa, berdasarkan Takson, 2012 dan 2016

Kunci: ■ Bonobo ■ Simpanse ■ Gorila
■ Orangutan ■ Owa



Catatan: Angka diambil dari data agregat yang disajikan dalam laporan kepemilikan spesies yang diserahkan kepada Sistem Informasi Spesies Internasional (International Species Information System), yang berganti nama menjadi Species360 pada 2016. Beberapa angka mungkin menunjukkan kepemilikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Sumber data: Durham (2015, Gambar 8.1); Species360 (2016)

Meskipun Italia, Norwegia, dan Skotlandia sedang mempertimbangkan atau menerapkan larangan (Banks, 2016; Born Free Foundation, 2016a, 2016b; Tyson, Draper dan Turner, 2016). Beberapa negara lainnya memilih “daftar putih/white lists” spesies yang disetujui untuk kepemilikan pribadi. Daftar ini tidak termasuk kera, artinya bahwa individu atau perusahaan tidak dapat memilikinya secara legal (Durham dan Phillipson, 2014).

Pengetahuan yang lebih baik juga merupakan kunci perubahan positif. Sebagai tanggapan terhadap data yang menunjukkan proporsi signifikan turunan campuran (marga simpanse) dalam program penangkaran, European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) memutuskan untuk memfokuskan upaya yang sedang berlangsung pada subspecies barat dan tengah (*Pan troglodytes verus* dan *Pan t. troglodytes*), sembari memulai moratorium penangkaran simpanse

lainnya, termasuk hibrida (Carlsen dan de Jongh, 2015; Hvilsom *et al.*, 2013). Terlepas dari kemajuan tersebut, masih ada beberapa tantangan, termasuk berkenaan dengan kerja sama internasional mengenai prioritas dan praktik yang baik untuk pemeliharaan dan kesejahteraan kera di dalam kurungan.

Kebutuhan kerja sama global sangat kentara mengingat bagaimana peraturan dan tindakan di suatu negara atau wilayah hukum dapat menimbulkan implikasi yang tidak terduga pada negara lain. Contoh kasus adalah Fish and Wildlife Service Amerika Serikat, yang mematuhi aturan yang diputuskan oleh National Institutes of Health Amerika Serikat untuk menghentikan penelitian medis menggunakan simpanse, mengizinkan pemindahan delapan simpanse dari Pusat Penelitian Yerkes National Primate di Amerika Serikat ke kebun binatang tak terakreditasi di Inggris, Wingham Wildlife Park. Tampaknya lembaga tersebut memberikan izin pemindahan sebagian berdasarkan pada janji Yerkes untuk memberikan sumbangan untuk memulai sebuah proyek baru yang dipimpin oleh badan amal Inggris di Uganda, dan bukan karena potensi peningkatan spesies melalui pemindahan tersebut, seperti yang diharapkan berdasarkan Undang-Undang Spesies Terancam Amerika Serikat (Gorman, 2016). Sejumlah organisasi—termasuk Great Apes Survival Partnership PBB dan Wildlife Conservation Society—telah menolak tawaran bantuan dari Yerkes (Bale, 2016).

Berbagai pemangku kepentingan global menentang pemindahan tersebut selama proses perizinan masih berlarut-larut (Gorman, 2015b, 2016). Pan African Sanctuary Alliance mengutip kekhawatiran mengenai preseden yang akan membuat perlawanan terhadap perdagangan komersial kera menjadi lebih berat, terutama berkenaan dengan pasar

ilegal untuk bayi kera (PASA, 2016b). EAZA yang mencatat tantangan terkait dengan kapasitas kebun binatang dan fasilitas pemeliharaan di Eropa menyatakan, “Masih banyak simpanse di Eropa yang harus ditempatkan di luar penampungan/perlindungan dan tidak cukup tempat yang baik untuk menemukannya” (Carlsen dan de Jongh, 2015). Tuntutan untuk mencegah pemindahan tersebut akhirnya gagal dan tujuh simpanse (yang kedelapan mati saat proses tersebut berlangsung) dapat

dipindahkan ke Wingham Wildlife Park pada September 2016 (Gorman, 2016). Karena kasus ini tersorot, para pemangku kepentingan mencapai kesepakatan mengenai prioritas atau mengenai apa yang menjadi praktik yang baik dalam pengelolaan kera di fasilitas pemeliharaan. Kerja sama internasional yang lebih baik dan penyampaian praktik yang sehat secara ilmiah dan etis dapat membantu menutup celah peraturan, mengurangi risiko, dan mempercepat kemajuan perlindungan global.

TABEL 8.6

Jumlah Kera di Pusat Penyelamatan di Afrika, berdasarkan Takson dan Negara, 2011 vs. 2015

Negara	Jumlah suaka margasatwa	Bonobo			Simpanse			Gorila		
		2011	2015	% perubahan	2011	2015	% perubahan	2011	2015	% perubahan
Kamerun	4				244	245	0	33	36	9
RDK*	6	55	72	31	85	104	22	30	18	-40
Gabon	3				20	20	0	9	45	400
Gambia	1				77	106	38			
Guinea	1				38	49	29			
Pantai Gading	1				n/a	1				
Kenya	1				44	39	-11			
Liberia	1				n/a	63				
Nigeria	1				28	30	7			
Republik Kongo	3				156	145	-7	5	28	460
Rwanda*	1				0	0	0	6	0	-100
Sierra Leone	1				101	75	-26			
Afrika Selatan	1				33	13	-61			
Uganda	1				45	48	7			
Zambia	1				120	126	5			
Total	27	55	72	31	1.071	1.065	-1	83	127	53

Catatan: Angka untuk jumlah populasi suaka margasatwa termasuk kelahiran, kematian, pemindahan, dan kedatangan baru. Baris negara sebaran diarsir. * Angka pada kolom 2011 untuk RDK dan Rwanda mencakup jumlah dari operasi lintas batas yang dilakukan bersama. Untuk detailnya, lihat Durham dan Phillipson (2014).

Sumber data: Durham dan Phillipson (2014); PASA (2015); Wanshel (2016)

Kera dalam Kurungan di Negara Sebaran dan Sekitarnya

Angka aktual pusat penyelamatan di dan sekitar negara sebaran ditampilkan pada Tabel 8.6 dan 8.7. Secara keseluruhan, jumlah simpanse relatif stabil, sedangkan jumlah bonobo dan gorila meningkat dari jumlah yang dilaporkan pada 2011 dalam edisi pertama *Negara Kera* (Durham dan Phillipson, 2014, tabel 10.7, 10.8).

Perubahan lainnya adalah dimasukkannya tempat perlindungan di Liberia yang baru-baru ini diklasifikasi ulang sebagai pusat penyelamatan. Dari 1976 hingga 2007, fasilitas ini berfungsi sebagai laboratorium penelitian the New York Blood Center, melaksanakan uji coba biomedis invasif terhadap simpanse. Sebagaimana disebutkan di atas, Blood Center menarik dana untuk koloni simpanse pada 2015; keputusan tersebut memicu kemarahan publik atas pemeliharaan mereka dan menginisiasi upaya penggalangan dana (Gorman, 2015a). Sejak saat itu, nasib simpanse di Liberia tersebut mengalami peningkatan, khususnya saat ini ketika tempat perlindungan tersebut terbentuk dan LSM Liberia Chimpanzee Rescue dibentuk untuk memastikan kesejahteraan mereka (Palm, 2015). Simpanse lainnya, satu-satunya yang selamat dari kelompok yang ditinggalkan Blood Center di lepas pantai Pantai Gading pada awal 1980-an, saat ini mendapatkan pemeliharaan yang didanai oleh sebuah organisasi, yang juga berupaya untuk mencegah pemindahan antarnegara karena penempatan di pusat penyelamatan Chimfunshi di Zambia ditolak pada 2016 (Wanshel, 2016; T. Calvi, komunikasi pribadi, 2016).

Kebun binatang di Afrika juga menampung kera meskipun jumlahnya jauh lebih sedikit daripada di pusat-pusat penyelamatan. Dilaporkan ada 59 kera di kebun binatang di benua tersebut: 33 simpanse, 5 gorila, 20 owa dan 1 orangutan

(Species360, 2016). Dengan demikian, suaka dan pusat penyelamatan menampung lebih dari 95,5% seluruh kera yang berada di dalam kurungan di Afrika.

Pusat penyelamatan di negara sebaran di Afrika sedikit demi sedikit tetapi stabil telah menerima penghuni baru melalui penyelamatan. Pada beberapa kasus, mereka memindahkan atau menggabungkan kera di antara mereka sendiri. Sebaliknya, pusat penyelamatan di Asia terus mengalami permintaan untuk memelihara kera. Sebuah kajian terkini dari data tentang kera besar yang disita antara 2005 dan 2016 mengungkapkan bahwa 67% dari kasus tersebut adalah kasus orangutan (GRASP, 2016).

Tantangan yang terus-menerus dihadapi pusat penyelamatan orangutan digambarkan dalam volume pertama seri ini, dalam studi kasus Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), yang pada saat itu memelihara hampir 820 orangutan (Durham dan Phillipson, 2014, p.303). Mengingat pemerintah Indonesia berniat melepaskan semua orangutan yang sehat, fokus upaya BOSF berlanjut pada rehabilitasi (Indonesia MoF, 2009). Sejak 2012, BOSF telah melakukan reintroduksi terhadap 234 orangutan—39 di antaranya berlangsung antara Januari dan November 2016; BOSF akan melepaskan 250 orangutan lainnya pada akhir 2017 (N. Hermanu, komunikasi pribadi, 2016). Pada saat penulisan ini, 667 orangutan berada di BOSF: 471 di Nyaru Menteng dan 196 di Samboja Lestari. Sekitar 150 di antaranya tidak mengikuti sekolah hutan karena alasan kesehatan. Dari sisanya, 114 di antaranya berada di pulau prapelepasan dan lebih dari 400 telah dinyatakan sehat, artinya dapat dilepaskan (N. Hermanu, komunikasi pribadi, 2016).

Sebaliknya, suaka margasatwa terakreditasi GFAS, IAR Ketapang, mengalami peningkatan jumlah orangutan pada 2016. Tim ini melepaskan 18 orangutan tahun itu, tetapi membawa masuk 28 orangutan

TABEL 8.7**Jumlah Orangutan dan Owa di Fasilitas Penanganan di Asia, berdasarkan Negara, 2016**

Negara	Orangutan	Owa
Kamboja		77
Indonesia	1.147	293
Malaysia	98	
Thailand	2	229
Vietnam		45
Total	1.247	644

Catatan: Angka mungkin mencakup kepemilikan sebelum 2016. Angka rata-rata digunakan jika terdapat selisih. Total populasi di pusat penyelamatan termasuk kelahiran, kematian, dan kedatangan baru karena penyelamatan atau pemindahan.

Sumber data: Durham (2015); Highland Farm (n.d.); Kalaweit France (2016); OFI (n.d.); Orangutan Appeal UK (n.d.); Species360 (2016); komunikasi pribadi: Gibbon Rehabilitation Project (2017); N. Hermanu (2016); M. Kenyon (2016); Orangutan Project (2017); E. Pollard (2016); K. Sánchez (2017)

sehingga total ada 106 orangutan penghuni pusat penyelamatan ini (K. Sánchez, komunikasi pribadi, 2017). Pola pertumbuhan serupa juga terjadi pada pusat penyelamatan yang fokus pada owa dan siamang, Kalaweit, yang ditampilkan dalam volume kedua *Negara Kera* (Durham, 2015). Pada 2014, Kalaweit melaporkan bahwa mereka telah menyelamatkan 16 kera selama tahun sebelumnya, dan dengan demikian jumlah penghuni suka margasatwa meningkat 6%, menjadi 254 (Durham, 2015, h. 237–39). Pada Agustus 2016, kera yang menghuni suka margasatwa bertambah menjadi 293, meningkat 15%, tidak termasuk kera yang dilepaskan sejak 2014 (Kalaweit France, 2016).

Seiring dengan keberhasilan penyelamatan kera dan penegakan hukum yang terus berlanjut, masuknya penghuni baru mengimbangi reintroduksi yang dilakukan pusat penyelamatan di Asia seperti BOSE, IAR Ketapang dan Kalaweit. Reintroduksi penuh dengan rangkaian tantangan yang kompleks, sebagaimana dibahas di atas. Pusat penyelamatan harus dapat memilah prioritas seperti penempatan lapangan, mengumpulkan perwakilan dalam pertemuan pemangku kepentingan internasional dan ikut serta dalam perencanaan penggunaan lahan, juga

memastikan kesehatan dan kesejahteraan kera di dalam kurungan dan di habitat alami mereka. Tabel 8.7 mencantumkan jumlah orangutan dan owa yang menghuni suka dan pusat penyelamatan di Asia pada 2016.

Di Asia, seperti halnya di Eropa, sebagian besar kera penangkaran berada di kebun binatang. Kecuali data yang disajikan untuk Jepang pada Tabel 8.5, kebun binatang yang memberikan laporan sukarela kepada Species360 yang menampung 24 gorila, 344 owa, sekitar 200 simpanse dan 130 orangutan (Species360, 2016).

Kesimpulan

Di seluruh dunia, ribuan kera secara ilegal diburu, diperdagangkan, dan dieksploitasi untuk kepentingan pribadi dan komersial. Kita mungkin tidak akan tahu secara pasti berapa persen kera yang disita atau ditemukan kemudian ditempatkan di pusat penyelamatan, tetapi ada pengakuan bahwa pusat-pusat penyelamatan yang menampung mereka menghadapi tantangan besar dan bahwa hasilnya tidak teramati dengan baik di tingkat nasional ataupun internasional (D’Cruze dan Macdonald, 2016).

Berbagai negara mengembangkan kerangka hukum dan peraturan yang lebih kuat untuk perlindungan kera dan karena praktisi pemeliharaan terus meningkatkan standar dan kapasitas mereka, peluang untuk menurunkan ancaman terhadap kera dalam kurungan dan meningkatkan kualitas hidupnya juga turut meningkat. Bersama-sama dengan kebun binatang terakreditasi, pusat-pusat penyelamatan yang memberikan pemeliharaan kepada kera yang diselamatkan berperan penting dalam mendorong praktik ini ke depan, paling tidak bergabung dengan mitra yang kuat.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pemeliharaan, memastikan bahwa pusat-pusat penyelamatan ini memiliki sumber daya dan diakui sebagai pemangku kepentingan utama dalam pembuatan kebijakan serta penelitian ilmiah harus menjadi prioritas. Dengan adanya permintaan ruang perlindungan dan layanan yang berkelanjutan dan berkembang, pusat-pusat penyelamatan memerlukan dukungan dan kemitraan yang andal sehingga mereka dapat berkontribusi dalam memberikan standar perawatan yang sama tingginya baik kepada kera pendatang maupun kera penghuni.

Ucapan Terima Kasih

Penulis Seksi I: Julie Sherman⁵ dan David Greer⁶

Kontributor Seksi II: Marc Ancrenaz, Nicholas Bachand, Susan Cheyne, Christelle Colin, Debby Cox, Doug Cress, Kay Farmer, Erik Meijaard, Kari Nienstedt, Tamar Ron, Anne Russon, Albert Schenk, Steve Unwin, Itsaso Vélez del Burgo, Liz Williamson serta pusat penyelamatan dan rehabilitasi yang telah berkontribusi.

Penulis Seksi II: Debra Durham⁷

Ucapan terima kasih penulis: Atas kesediaan berbagai data untuk pembaruan statistik, penulis sangat berterima kasih kepada pihak-pihak berikut: Species360, the ApeTaxon Advisory Group dan afiliasi SSPs, ChimpCARE, PASAdan suaka margasatwa individual serta pusat penyelamatan yang memberikan angka-angka dan laporan.

Penelaah: Meredith Bastian, Kay Farmer and Karnele Llano Sánchez

Catatan Akhir

- 1 Untuk melindungi kerahasiaan komunikasi yang dilakukan guna penelitian ini, kajian ini tidak menampilkan sumber-sumber tertentu yang akan mengungkap identitas dan lokasi fasilitas yang dikaji.
- 2 Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ancrenaz *et al.* (2016); Campbell *et al.* (2015); Fruth *et al.* (2016); Humle *et al.* (2016); Maisels *et al.* (2016a); Plumtre, Robbins and Williamson (2016c) dan Singleton *et al.* (2016). Undang-Undang Konservasi Satwa Liar dan Taman Nasional mendahului kemerdekaan Sudan Selatan tetapi masih berlaku karena revisi tahun 2015 belum diberlakukan menjadi undang-undang (CANS, 2013; A. Schenk, komunikasi pribadi, 2017).
- 3 Untuk detail, lihat Ancrenaz *et al.* (2015b); Brou Yao *et al.* (2005); Campbell *et al.* (2008); Geissmann *et al.* (2013); Hockings and Humle (2009); Imong *et al.* (2014a); Indonesia MoF (2009); Lao MAF (2011); Molur *et al.* (2005); Rawson *et al.* (2011); SWD (2011); Turvey *et al.* (2015); White and Fa (2014); Wich *et al.* (2012b); Williamson *et al.* (2014).
- 4 Untuk informasi lebih lanjut, lihat Campbell *et al.* (2008); Dunn *et al.* (2014); Geissmann *et al.* (2013); Gumal dan Braken Tisen (2015); Indonesia MoF (2009); Lao MAF (2011); Lu dan Tianxiao (2012); Maldonado dan Fourrier (2015); Molur *et al.* (2005); Morgan *et al.* (2011); Plumtre *et al.* (2010); Rawson *et al.* (2011); SWD (2011); Turvey *et al.* (2015).
- 5 Wildlife Impact – <https://wildlifeimpact.org/>
- 6 WWF – http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/great_apes/apes_programme/
- 7 Save the Chimps – <http://www.savethechimps.org/>